



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR KEP 472/K/D2/2021

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN

PERSEDIAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

(*COVID-19*) DI TINGKAT DAERAH

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (9) huruf b Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyiapkan pedoman pengawasan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan Vaksin *COVID-19* dan pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Distribusi

dan Pengelolaan Persediaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tingkat Daerah;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tingkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menjadi acuan bagi:
- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian/Lembaga; dan
 - c. APIP Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern atas Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin COVID-19 di tingkat Daerah.
- KEEMPAT : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin COVID-19 di tingkat Daerah.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2021

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,

Eri Satriana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR KEP 472/K/D2/2021
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN DISTRIBUSI DAN
PENGELOLAAN PERSEDIAAN VAKSIN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI TINGKAT DAERAH

PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN
PERSEDIAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*) DI TINGKAT DAERAH

A. Tujuan Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan distribusi dan pengelolaan persediaan vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat daerah bertujuan memberikan keyakinan yang memadai atas distribusi vaksin COVID-19 dan pengelolaan persediaan vaksin COVID-19 di tingkat daerah.

B. Sasaran dan Ruang Lingkup Pengawasan

1. Sasaran Pengawasan

Sasaran Pengawasan Pelaksanaan Distribusi vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pengelolaan Persediaan Vaksin COVID-19 di Daerah meliputi:

- a. Penilaian 4 (empat) tepat yaitu tepat sasaran/tujuan distribusi, tepat jumlah dan jenis, tepat waktu pengiriman, serta tepat administrasi;
- b. Memberikan keyakinan memadai tata kelola distribusi dan persediaan vaksin telah dilakukan secara baik; dan
- c. Kecukupan pengendalian risiko *fraud*.

2. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang Lingkup Pengawasan Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin COVID-19 di daerah meliputi:

- a. Entitas Pencatatan (EP), merupakan entitas yang memiliki akun *SMILE* yang bertanggung jawab atas pengelolaan persediaan vaksin. Entitas pencatatan (EP) meliputi:
 - 1) Dinas Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disebut sebagai EP-Provinsi;
 - 2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut sebagai EP-KAKO; dan
 - 3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempunyai akun *SMILE* yang selanjutnya disebut sebagai EP-Fasyankes. EP fasyankes dapat berupa EP-Fasyankes Vertikal, EP-Fasyankes Provinsi, dan EP-Fasyankes Kako.
- b. Entitas Pencatatan Pembantu, merupakan entitas yang tidak mempunyai hak akses *SMILE* tersendiri, namun dapat membantu melakukan pencatatan pengelolaan persediaan vaksin pada EP di atasnya. Entitas pencatatan pembantu termasuk diantaranya Puskesmas Kelurahan (PKL), dan fasyankes lainnya yang dapat melakukan pembantuan pengisian pengelolaan persediaan vaksin pada EP di atasnya.
- c. Pelanggan, merupakan entitas yang mendapatkan alokasi vaksin, namun tidak mendapatkan hak akses *SMILE* dan juga tidak dapat melakukan tugas pembantuan. Entitas pelanggan termasuk diantaranya RSUD, Fasyankes Vertikal, Sentra Vaksinasi Massal, klinik, bidan praktik mandiri, dan fasyankes lainnya yang tidak dapat melakukan pembantuan pengisian *SMILE*.

C. Pelaksana Pengawasan

1. Pengawasan Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin COVID-19 di daerah dilakukan oleh BPKP, APIP K/L, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah sesuai dengan wilayah kerjanya.
2. Masing-masing APIP agar mengalokasikan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan vaksinasi COVID-19.
3. Perwakilan BPKP menjadi koordinator terhadap kegiatan pengawasan vaksinasi COVID-19 di tingkat daerah.

D. Prosedur Pengawasan

1. EP Level Provinsi (EP-Provinsi)

a. Survey Pendahuluan

1) Mengumpulkan dokumen/ informasi mengenai:

- a) Struktur organisasi pelaksana distribusi dan pengelola persediaan vaksin COVID-19 di EP-Provinsi;
- b) Jumlah kebutuhan vaksin di EP-Provinsi, realisasi jumlah dan jenis penerimaan vaksin dari pusat dan *buffer stock*;
- c) Jumlah dan jenis vaksin COVID-19 yang telah didistribusikan oleh EP-Provinsi;
- d) Data realisasi jumlah dan jenis penggunaan vaksin COVID-19 (penerimaan, konsumsi, dan pengembalian) di EP-Provinsi;
- e) Dapatkan dan pelajari tata kelola (kebijakan, prosedur, dan kelembagaan) terkait persediaan farmasi Vaksin COVID-19 yang telah ditentukan dalam pelaksanaan penanganan vaksin COVID-19;
- f) Sistem administrasi/pencatatan yang digunakan dalam pengelolaan persediaan vaksin COVID-19 dan distribusinya ke EP level di bawahnya dan/atau pelanggan;

2) Lakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen di atas untuk memperoleh pemahaman atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pengawasan;

3) Pemahaman atas kegiatan mitra pengawasan juga dapat dilakukan dengan cara mengundang ekspose atau wawancara dengan pihak mitra pengawasan; dan

4) Buat kesimpulan hasil Survey Pendahuluan.

b. *Tentative Audit Objective* (TAO)

Tentative Audit Objective (TAO) di level provinsi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) EP-Provinsi tidak menerima jumlah dan jenis vaksin yang sesuai dengan alokasi dari Pusat;
- 2) Distribusi vaksin dari EP-Provinsi kepada EP dibawahnya dan/atau pelanggan tidak tepat jumlah dan jenis;
- 3) Distribusi vaksin dari EP-Provinsi kepada EP dibawahnya dan/atau pelanggan tidak tepat waktu;

- 4) Distribusi vaksin dari EP-Provinsi kepada EP dibawahnya dan/atau pelanggan tidak tepat sasaran/tujuan distribusi;
- 5) Pencatatan/administrasi persediaan vaksin (penerimaan, konsumsi, dan pengembalian distribusi) di EP-Provinsi tidak terekam secara elektronik dengan tertib;
- 6) Terdapat anomali konsumsi vaksin dibandingkan dengan jumlah orang yang telah dilakukan vaksinasi di level provinsi;
- 7) Jumlah vaksin carrier dan kapasitas vaksin carrier tidak memadai untuk pengiriman sesuai dengan target jumlah pengiriman ke EP-Kako/EP-Fasyankes; dan
- 8) Terdapat selisih hasil *stock opname* dengan catatan hasil output SMILE terkait sisa persediaan vaksin di EP-Provinsi dan/atau HUB yang tidak dapat dijelaskan.

Terhadap TAO tersebut di atas masih dapat ditambahkan oleh APIP apabila ditemukan hal-hal penting lainnya namun masih dalam lingkup pengawasan.

Terkait TAO tersebut diatas dilakukan pengawasan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

- 1) TAO: EP-Provinsi tidak menerima jumlah dan jenis vaksin yang diterima tidak sesuai dengan alokasi dari yang dikirimkan oleh Pusat;

Tujuan Pengawasan: memastikan jumlah dan jenis vaksin yang diterima oleh EP-Provinsi telah sesuai dengan yang dialokasikan dan didistribusikan dari Pusat dan/atau HUB.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan data alokasi/perencanaan kebutuhan vaksin untuk tingkat provinsi;
- b) Dapatkan dokumen/surat alokasi distribusi vaksin dari Pusat;
- c) Dapatkan dokumen distribusi seperti, *Vaccine Arrival Report* (VAR) dan *Packing Slip/DO* dari PT. Bio Farma (Persero) atas distribusi vaksin dari Pusat ke EP-Provinsi;
- d) Bandingkan dokumen yang telah diperoleh pada poin 1, poin 2, dan poin 3 berkaitan jumlah dan jenis vaksin yang didistribusikan dengan yang dialokasikan/direncanakan;

- e) Catat hal-hal yang tidak sesuai dan identifikasi permasalahan;
- f) Lakukan analisis dan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk menggali penyebab dan akibat dari permasalahan terjadi; dan
- g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.

2) TAO: Distribusi vaksin dari EP-Provinsi kepada EP dibawahnya dan/atau pelanggan tidak tepat jumlah dan jenis.

Tujuan Pengawasan: memastikan jumlah dan jenis vaksin yang didistribusikan oleh EP-Provinsi telah sesuai.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan data/dokumen penetapan alokasi vaksin (jumlah dan jenis vaksin) yang akan didistribusikan dari Pusat dan EP-Provinsi;
 - b) Dapatkan dokumen pendukung pengiriman seperti DO dan/atau SBBK dari EP-Provinsi ke EP-Kako/EP-Fasyankes yang telah ditandatangani oleh EP penerima;
 - c) Bandingkan dokumen yang diperoleh pada poin 1 dengan poin 2, mengenai ketepatan jumlah dan jenis vaksin yang didistribusikan;
 - d) Catat dan identifikasi permasalahan yang ditemukan;
 - e) Lakukan analisis dan wawancara untuk mengetahui penyebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi; dan
 - f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.
- 3) TAO: Distribusi vaksin dari EP-Provinsi kepada EP di bawahnya dan/atau pelanggan tidak tepat waktu.

Tujuan pengawasan: memastikan distribusi vaksin dari EP-Provinsi ke EP dibawahnya telah sesuai dengan waktu/jadwal yang ditetapkan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan data/dokumen penetapan jadwal distribusi yang telah disesuaikan dengan pelaksanaan vaksinasi dari Pusat (kementerian kesehatan) dan Penyedia (Bio Farma);

- b) Dapatkan dokumen distribusi seperti, *Vaccine Arrival Report* (VAR) dan *Packing Slip/DO* dari PT. Bio Farma (Persero) atas distribusi vaksin dari Pusat ke EP-Provinsi;
 - c) Dapatkan dokumen pendukung pengiriman seperti DO dan/atau SBBK dari EP-Provinsi ke EP-Kako/EP-Fasyankes yang telah ditandatangani oleh EP penerima;
 - d) Bandingkan dokumen yang diperoleh pada poin 1 dengan poin 3, teliti apakah antara jadwal dan tanggal diterima di SBBK telah memenuhi kewajaran ketepatan waktu vaksin yang didistribusikan;
 - e) Bandingkan dokumen yang diperoleh pada poin 2 dengan poin 3, teliti berapa lama vaksin yang telah diterima tersimpan/mengendap di Gudang Farmasi EP-Provinsi sebelum didistribusikan ke EP dibawahnya dan/atau pelanggan (*turnover* vaksin);
 - f) Catat dan identifikasi permasalahan yang ditemukan;
 - g) Lakukan wawancara dengan pihak terkait dan analisis jika ada permasalahan untuk mengetahui penyebabnya; dan
 - h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.
- 4) TAO: Distribusi Vaksin dari EP-Provinsi ke EP dibawahnya dan/atau pelanggan tidak tepat sasaran/tujuan distribusi.
- Tujuan Pengawasan: memastikan distribusi vaksin dari EP-Provinsi ke EP dibawahnya telah sesuai dengan penetapan lokasi tujuan distribusinya.
- Langkah kerja pengawasan:
- a) Dapatkan surat penetapan alokasi vaksin yang akan didistribusikan dari EP-Provinsi ke EP dibawahnya dan/atau pelanggan;
 - b) Dapatkan dokumen pendukung pengiriman seperti DO dan/atau SBBK dari EP-Provinsi ke EP-Kako/EP-Fasyankes yang telah ditandatangani oleh EP penerima;
 - c) Bandingkan dokumen yang diperoleh pada poin 1 dengan poin 2 mengenai ketepatan sasaran/ tujuan vaksin yang didistribusikan;
 - d) Catat dan identifikasi permasalahan yang ditemukan;

- e) Lakukan wawancara dengan pihak terkait dan analisis jika ada permasalahan untuk mengetahui penyebabnya; dan
 - f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.
- 5) TAO: Pencatatan/administrasi persediaan vaksin (penerimaan, konsumsi, dan distribusi) di EP-Provinsi tidak terekam secara elektronik pada aplikasi SMILE dengan tertib.

Tujuan pengawasan: memastikan pencatatan distribusi dan penggunaan vaksin telah diinput pada aplikasi SMILE sesuai dengan ketentuan.

Langkah kerja Pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen penerimaan berupa *Vaccine Arrival Report* (VAR) dan *Packing Slip*/DO dari PT. Bio Farma (Persero)/HUB atas distribusi vaksin dari Pusat ke EP-Provinsi, dan pastikan kesesuaian informasi dari *biotracking* Bio Farma dengan informasi pada pencatatan penerimaan pada aplikasi *SMILE*;
- b) Dapatkan data distribusi dan kartu persediaan vaksin provinsi (kartu catatan persediaan) di gudang farmasi Provinsi/HUB, dan pastikan kesesuaian informasi kartu persediaan dengan informasi pada pencatatan distribusi di aplikasi *SMILE*;
- c) Dapatkan data penerimaan pengembalian vaksin dari EP-Kako dan EP-Fasyankes, dan pastikan kesesuaian informasi data tersebut dengan informasi pada pencatatan penerimaan pengembalian di aplikasi *SMILE* dan apakah telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pengembalian;
- d) Dapatkan data pengembalian distribusi vaksin dari EP-Provinsi ke Pusat, dan pastikan kesesuaian informasi data tersebut dengan informasi pada pencatatan pengembalian distribusi vaksin di aplikasi *SMILE* dan apakah telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pengembalian;
- e) Lakukan sampling data konsumsi vaksin pada EP-Provinsi yang digunakan oleh fasyankes atau sentra vaksinasi yang tidak memiliki akun *SMILE* untuk memastikan kesesuaian informasi data tersebut dengan informasi pada pencatatan konsumsi di aplikasi *SMILE*;

- f) Dapatkan data pembuangan vaksin di EP-Provinsi, dan pastikan kesesuaian informasi data tersebut dengan informasi pada pembuangan vaksin di aplikasi SMILE dan apakah telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembuangan;
 - g) Catat jika terdapat ketidaksesuaian dan identifikasi permasalahannya;
 - h) Lakukan wawancara dengan pihak terkait dan analisis jika ada permasalahan untuk mengetahui penyebabnya; dan
 - i) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.
- 6) TAO: Terdapat anomali konsumsi vaksin dibandingkan dengan jumlah orang yang telah dilakukan vaksinasi pada level Provinsi.
Tujuan Pengawasan: memastikan efisiensi penggunaan vaksin COVID-19 pada level Provinsi.
Langkah kerja pengawasan:
- a) Dapatkan laporan/data jumlah orang yang telah dilakukan vaksinasi di EP-Provinsi dari aplikasi P-CARE;
 - b) Dapatkan laporan/data konsumsi vaksin di EP-Provinsi sesuai aplikasi *SMILE*;
 - c) Uji/bandingkan kesesuaian konsumsi vaksin dengan jumlah sasaran yang telah dilakukan vaksinasi di Provinsi per tanggal yang sama;
 - d) Catat persentase perbedaan antara laporan konsumsi vaksin dengan jumlah sasaran yang disuntikan tersebut pada tanggal yang sama;
 - e) Lakukan wawancara dengan pihak terkait dan analisis permasalahan jika persentasenya tinggi untuk mengetahui penyebabnya; dan
 - f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.
- 7) TAO: Jumlah vaksin carrier dan kapasitas vaksin carrier tidak memadai untuk pengiriman sesuai dengan target jumlah pengiriman ke EP-Kako/EP-Fasyankes.
Tujuan Pengawasan: memastikan jumlah vaksin carrier dan kapasitas vaksin carrier telah memadai untuk pengiriman sesuai dengan target jumlah pengiriman ke EP-Kako/EP-Fasyankes.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen pendukung pengiriman seperti DO dan/atau SBBK dari EP-Provinsi ke EP-Kako/EP-Fasyankes yang telah ditandatangani oleh EP penerima;
 - b) Dapatkan informasi jumlah vaksin carrier yang digunakan untuk pendistribusian dari setiap DO dan/atau SBBK sebagaimana dalam huruf a);
 - c) Dapatkan informasi kapasitas masing-masing vaksin carrier yang digunakan saat pendistribusian dalam huruf a);
 - d) Kaji kewajaran kapasitas vaksin carrier dan jumlah vaksin carrier yang digunakan dalam huruf a), huruf b), dan huruf c) dengan memperhatikan ketentuan bahwa vaksin tidak bersentuhan dengan coolpack di dalam vaksin carrier sesuai dengan ketentuan dalam CDOB;
 - e) Catat permasalahan yang ditemukan;
 - f) Lakukan wawancara atau analisis jika ada permasalahan atau ketidaksesuaian antara kondisi sarana distribusi dengan persyaratannya; dan
 - g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.
- 8) TAO: Terdapat selisih hasil *stock opname* dengan catatan hasil *output SMILE* terkait sisa persediaan vaksin di EP-Provinsi yang tidak dapat dijelaskan.

Tujuan Pengawasan: memastikan jumlah persediaan vaksin provinsi di gudang farmasi/*buffer stock* provinsi/HUB telah sesuai dengan pencatatan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan catatan hasil *output SMILE* terkait sisa persediaan vaksin pada tanggal *cut off*;
- b) Dapatkan dokumen pendukung penerimaan, pengembalian distribusi, pembuangan dan konsumsi vaksin dari awal penerimaan sampai dengan tanggal *cut off*;
- c) Bandingkan dokumen yang diperoleh dalam huruf a) dan huruf b), teliti apakah catatan hasil *output SMILE* pada tanggal *cut off* telah didukung dengan dokumen;
- d) Lakukan *stock opname* vaksin di gudang farmasi Provinsi/HUB;

- e) Lakukan *traceback* mutasi keluar dan masuk vaksin serta masukkan hasilnya dalam Kertas kerja stock opname persediaan vaksin COVID-19 untuk mengetahui jumlah sisa persediaan vaksin pada tanggal *cut off*;
- f) Bandingkan hasil *stock opname* di gudang farmasi Provinsi dengan catatan hasil *output SMILE* yang telah dilakukan *traceback* mutasi keluar dan masuk vaksin sampai dengan tanggal *cut off*;
- g) Catat jika ada selisih antara pencatatan dan hasil *stock opname*;
- h) Lakukan observasi dan wawancara terkait proses pencatatan stok di Provinsi yang dilakukan pengawasan;
- i) Lakukan wawancara ke pihak yang bertanggungjawab atau analisis jika ada permasalahan atau ketidaksesuaian antara pencatatan dan jumlah stok vaksin;
- j) Apabila atas vaksin yang tidak bisa dijelaskan, penanggung jawab tidak bersedia membuat surat pernyataan tanggung jawab, agar yang bersangkutan membuat surat keterangan akan melakukan penelusuran atas vaksin tersebut;
- k) Atas stock yang masih menumpuk secara significant, minta penjelasan dengan Pimpinan EP terkait;
- l) Tuangkan langkah kerja 4 dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik;
- m) Format Berita Acara dalam huruf kminimal ditandatangani oleh pengelola farmasi pada EP-Provinsi dan auditor yang melakukan cek fisik serta diketahui oleh Pimpinan EP-Provinsi; dan
- n) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.

2. Level EP Level Kabupaten/Kota (EP-Kako)

a. Survey Pendahuluan

- 1) Mengumpulkan dokumen/informasi mengenai:
 - a) Struktur organisasi pelaksana distribusi dan pengelola stok COVID-19 tingkat EP-Kako;
 - b) Jumlah kebutuhan vaksin COVID-19 EP-Kako, realisasi jumlah dan jenis penerimaan vaksin dari provinsi dan *buffer stock*;

- c) Jumlah dan jenis vaksin COVID-19 yang telah didistribusikan oleh EP-Kako;
 - d) Data realisasi jumlah dan jenis penggunaan vaksin COVID-19 (penerimaan, konsumsi, dan pengembalian) di EP-Kako;
 - e) Dapatkan dan pelajari tata kelola (kebijakan, prosedur, dan kelembagaan) terkait persediaan farmasi Vaksin COVID-19 yang telah ditentukan dalam pelaksanaan penanganan vaksin COVID-19; dan
 - f) Sistem administrasi/pencatatan yang digunakan dalam pengelolaan persediaan vaksin COVID-19 dan distribusinya ke EP-Fasyankes.
- 2) Lakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen di atas untuk memperoleh pemahaman atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pengawasan;
- 3) Pemahaman atas kegiatan mitra pengawasan juga dapat dilakukan dengan cara mengundang ekspose atau wawancara dengan pihak mitra pengawasan; dan
- 4) Buat kesimpulan hasil Survey Pendahuluan.
- b. *Tentative Audit Objective (TAO)* di level Kabupaten/Kota
- Tentative Audit Objective (TAO)* di EP-Kako dapat diidentifikasi sebagai berikut:
- 1) EP-Kako tidak menerima jumlah dan jenis vaksin yang sesuai dengan alokasi dari Pusat dan/atau Provinsi;
 - 2) Distribusi vaksin dari EP-Kako kepada EP di bawahnya dan/atau pelanggan tidak tepat jumlah dan tepat jenis;
 - 3) Distribusi vaksin dari EP-Kako kepada EP di bawahnya dan/atau pelanggan tidak tepat waktu;
 - 4) Distribusi vaksin dari EP-Kako kepada EP di bawahnya dan/atau pelanggan tidak tepat sasaran/ tujuan distribusi;
 - 5) Pencatatan/administrasi persediaan vaksin (penerimaan, konsumsi, dan distribusi) di EP-Kako tidak terekam secara elektronik dengan tertib;
 - 6) Terdapat anomali konsumsi vaksin dibandingkan dengan jumlah orang yang telah dilakukan vaksinasi di EP-Kako;
 - 7) Jumlah vaksin carrier dan kapasitas vaksin carrier tidak memadai untuk pengiriman sesuai dengan target jumlah pengiriman; dan

- 8) Terdapat selisih hasil *stock opname* dengan catatan hasil output SMILE terkait sisa persediaan vaksin di EP-Kako yang tidak dapat dijelaskan.

Terhadap TAO tersebut di atas masih dapat ditambahkan oleh APIP K/L apabila ditemukan hal-hal penting lainnya namun masih dalam lingkup pengawasan.

Terkait TAO tersebut diatas dilakukan pengawasan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

- 1) TAO: EP-Kako tidak menerima jumlah dan jenis vaksin yang sesuai dengan alokasi dari Pusat dan/ atau Provinsi;
Tujuan pengawasan: memastikan jumlah dan jenis vaksin yang diterima oleh EP level Kabupaten/Kota telah sesuai dengan yang didistribusikan dari EP level Pusat/provinsi/HUB.
Langkah kerja pengawasan:
 - a) Dapatkan data alokasi/perencanaan kebutuhan vaksin untuk tingkat Kabupaten/Kota;
 - b) Dapatkan dokumen/surat alokasi distribusi vaksin dari Kementerian Kesehatan/Provinsi;
 - c) Dapatkan dokumen distribusi berupa *Vaccine Arrival Report* (VAR) dan *Packing Slip*/DO dari PT. Bio Farma (Persero)/HUB atas distribusi vaksin dari pusat ke EP-Kako;
 - d) Dapatkan dokumen distribusi vaksin dari provinsi seperti, DO dan SBBK di dinas kesehatan Kabupaten/Kota;
 - e) Bandingkan dokumen yang telah diperoleh pada poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4 berkaitan jumlah dan jenis vaksin yang didistribusikan dengan yang dialokasikan/direncanakan;
 - f) Catat hal-hal yang tidak sesuai dan identifikasi permasalahan;
 - g) Lakukan analisis dan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk menggali penyebab dan akibat dari permasalahan terjadi; dan
 - h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.
- 2) TAO: Distribusi vaksin dari EP-Kako kepada EP di bawahnya dan/ atau pelanggan tidak tepat jumlah dan jenis.

Tujuan pengawasan: memastikan jumlah dan jenis vaksin yang didistribusikan oleh entitas EP-Kako kepada EP di bawahnya dan/ atau pelanggan telah sesuai.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan data/dokumen penetapan alokasi vaksin (jumlah dan jenis vaksin) yang akan didistribusikan dari Kementerian Kesehatan dan Kabupaten/Kota;
 - b) Dapatkan dokumen pendukung pengiriman seperti DO dan/ atau SBBK dari EP-Kako ke EP-Fasyankes yang telah ditandatangani oleh EP penerima;
 - c) Bandingkan dokumen yang diperoleh pada poin 1 dengan poin 2, mengenai ketepatan jumlah dan jenis vaksin yang didistribusikan;
 - d) Lakukan konfirmasi ke EP-Fasyankes di bawahnya atas ketepatan jumlah dan jenis vaksin yang telah didistribusikan oleh EP-Kako;
 - e) Catat dan identifikasi permasalahan yang ditemukan;
 - f) Lakukan analisis dan wawancara untuk mengetahui penyebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi; dan
 - g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.
- 3) TAO: Distribusi vaksin dari EP-Kako kepada EP di bawahnya dan/atau pelanggan tidak tepat waktu.

Tujuan Pengawasan: memastikan distribusi vaksin dari EP-Kako ke EP-Fasyankes telah sesuai dengan waktu/jadwal yang ditetapkan

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan data/dokumen penetapan jadwal distribusi yang telah disesuaikan dengan pelaksanaan vaksinasi dari EP-Kako;
- b) Dapatkan dokumen distribusi seperti, *Vaccine Arrival Report* (VAR) dan *Packing Slip/DO* dari PT. Bio Farma (Persero) atas distribusi vaksin dari Pusat ke EP-Kako dan DO dan/atau SBBK dari EP-Provinsi ke EP-Kako;
- c) Dapatkan dokumen pendukung pengiriman seperti DO dan/atau SBBK dari EP-Kako ke EP-Fasyankes yang telah ditandatangani oleh EP penerima;

- d) Bandingkan dokumen yang diperoleh pada poin 1 dengan poin 3, teliti apakah antara jadwal dan tanggal diterima di SBBK telah memenuhi kewajaran ketepatan waktu vaksin yang didistribusikan;
- e) Bandingkan dokumen yang diperoleh pada poin 2 dengan poin 3, teliti berapa lama vaksin yang telah diterima tersimpan/mengendap di Gudang Farmasi EP-Kako sebelum didistribusikan (*turnover* vaksin);
- f) Catat dan identifikasi permasalahan yang ditemukan;
- g) Lakukan wawancara dengan pihak terkait dan analisis jika ada permasalahan untuk mengetahui penyebabnya; dan
- h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.

- 4) TAO: Distribusi vaksin dari EP-Kako kepada EP di bawahnya dan/atau pelanggan tidak tepat sasaran/tujuan distribusi.

Tujuan Pengawasan: memastikan distribusi vaksin dari EP-Kako ke EP di bawahnya telah sesuai dengan penetapan lokasi tujuan distribusinya.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan data/dokumen penetapan alokasi vaksin yang akan didistribusikan dari EP-Kako ke EP-Fasyankes;
 - b) Dapatkan dokumen pendukung pengiriman seperti DO dan/atau SBBK dari EP-Kako ke EP-Fasyankes;
 - c) Bandingkan dokumen yang diperoleh pada poin 1 dengan poin 2 mengenai ketepatan sasaran/ tujuan vaksin yang didistribusikan;
 - d) Catat dan identifikasi permasalahan yang ditemukan;
 - e) Lakukan wawancara dengan pihak terkait dan analisis jika ada permasalahan untuk mengetahui penyebabnya; dan
 - f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.
- 5) TAO: Pencatatan/administrasi persediaan vaksin (penerimaan, konsumsi, dan distribusi) di EP-Kako tidak terekam secara elektronik pada aplikasi SMILE dengan tertib.

Tujuan Pengawasan: memastikan pencatatan distribusi dan penggunaan vaksin telah diinput pada aplikasi SMILE sesuai dengan ketentuan

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen penerimaan berupa *Vaccine Arrival Report (VAR)* dan *Packing Slip/DO* dari PT. Bio Farma (Persero)/HUB atas distribusi vaksin dari Pusat ke EP-Kako, dan pastikan kesesuaian informasi dari biotracking Bio Farma dengan informasi pada pencatatan penerimaan pada aplikasi *SMILE*;
- b) Dapatkan dokumen penerimaan berupa SBBK atau BAST dari EP Provinsi atas distribusi vaksin dari EP-Provinsi ke EP-Kako, dan pastikan kesesuaian informasi tersebut dengan informasi pada pencatatan penerimaan pada aplikasi *SMILE*;
- c) Dapatkan data distribusi dan kartu persediaan vaksin kako (kartu catatan persediaan) di gudang farmasi Kako, dan pastikan kesesuaian informasi kartu persediaan dengan informasi pada pencatatan distribusi di aplikasi *SMILE*;
- d) Dapatkan data penerimaan pengembalian vaksin dari EP-Fasyankes, dan pastikan kesesuaian informasi data tersebut dengan informasi pada pencatatan penerimaan pengembalian di aplikasi *SMILE*;
- e) Dapatkan data pengembalian distribusi vaksin dari EP-Kako ke EP-Provinsi, dan pastikan kesesuaian informasi data tersebut dengan informasi pada pencatatan pengembalian distribusi vaksin di aplikasi *SMILE*;
- f) Lakukan sampling data konsumsi vaksin pada EP-Kako yang digunakan oleh fasyankes atau sentra vaksinasi yang tidak memiliki akun *SMILE* untuk memastikan kesesuaian informasi data tersebut dengan informasi pada pencatatan konsumsi di aplikasi *SMILE*;
- g) Dapatkan data pembuangan vaksin di EP-Kako, dan pastikan kesesuaian informasi data tersebut dengan informasi pada pembuangan vaksin di aplikasi *SMILE*;
- h) Catat jika terdapat ketidaksesuaian dan identifikasi permasalahannya;
- i) Lakukan wawancara dengan pihak terkait dan analisis jika ada permasalahan untuk mengetahui penyebabnya; dan

- j) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.
- 6) TAO: Terdapat anomali konsumsi vaksin dibandingkan dengan jumlah orang yang telah dilakukan vaksinasi pada level Kabupaten/Kota.

Tujuan pengawasan: memastikan efisiensi penggunaan vaksin COVID-19 pada level Kabupaten/Kota.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan laporan/data jumlah orang yang telah dilakukan vaksinasi di EP-Kako dari aplikasi P-CARE;
- b) Dapatkan laporan/data konsumsi vaksin di EP-Kako sesuai aplikasi *SMILE*;
- c) Uji/Bandingkan kesesuaian konsumsi vaksin dengan jumlah sasaran yang telah dilakukan vaksinasi di Kabupaten/kota per tanggal yang sama;
- d) Catat persentase perbedaan antara laporan konsumsi vaksin dengan jumlah sasaran yang disuntikan tersebut pada tanggal yang sama;
- e) Lakukan wawancara dengan pihak terkait dan analisis permasalahan jika persentasenya tinggi untuk mengetahui penyebabnya; dan;
- f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.
- 7) TAO: Jumlah vaksin carrier dan kapasitas vaksin carrier tidak memadai untuk pengiriman sesuai dengan target jumlah pengiriman.

Tujuan Pengawasan: memastikan jumlah vaksin carrier dan kapasitas vaksin carrier telah memadai untuk pengiriman sesuai dengan target jumlah pengiriman.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen pendukung pengiriman seperti DO dan/atau SBBK dari EP-Kako ke EP-Fasyankes yang telah ditandatangani oleh EP penerima;
- b) Dapatkan informasi jumlah vaksin carrier yang digunakan untuk pendistribusian dari setiap DO dan/atau SBBK sebagaimana pada poin 1;

- c) Dapatkan informasi kapasitas masing-masing vaksin carrier yang digunakan saat pendistribusian pada poin 1;
 - d) Kaji kewajaran kapasitas vaksin carrier dan jumlah vaksin carrier yang digunakan pada poin 1,2, dan 3 dengan memperhatikan ketentuan bahwa vaksin tidak bersentuhan dengan coolpack di dalam vaksin carrier sesuai dengan ketentuan dalam CDOB;
 - e) Catat permasalahan yang ditemukan;
 - f) Lakukan wawancara atau analisis jika ada permasalahan atau ketidaksesuaian antara kondisi sarana distribusi dengan persyaratannya; dan
 - g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.
- 8) TAO: Terdapat selisih hasil *stock opname* dengan catatan hasil output SMILE terkait sisa persediaan vaksin di EP-Kako yang tidak dapat dijelaskan.

Tujuan Pengawasan: memastikan jumlah persediaan vaksin provinsi di gudang memastikan jumlah persediaan vaksin di gudang farmasi Kabupaten/kota telah sesuai dengan pencatatan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan catatan hasil output *SMILE* terkait sisa persediaan vaksin pada tanggal *cut off*;
- b) Dapatkan dokumen pendukung penerimaan, pengembalian distribusi, pembuangan dan konsumsi vaksin dari awal penerimaan sampai dengan tanggal *cut off*;
- c) Bandingkan dokumen yang diperoleh pada poin 1 dengan poin 2, teliti apakah catatan hasil *output SMILE* pada tanggal *cut off* telah didukung dengan dokumen;
- d) Lakukan *stock opname* vaksin di gudang farmasi Kabupaten/Kota;
- e) Lakukan *traceback* mutasi keluar dan masuk vaksin serta masukkan hasilnya dalam Kertas kerja *stock opname* persediaan vaksin COVID-19 untuk mengetahui jumlah sisa persediaan vaksin pada tanggal *cut off*;
- f) Bandingkan hasil *stock opname* di gudang farmasi Kabupaten/Kota dengan catatan hasil output SMILE yang

telah dilakukan *traceback* mutasi keluar dan masuk vaksin sampai dengan tanggal *cut off*;

- g) Catat jika ada selisih antara pencatatan dan *hasil stock opname*;
- h) Lakukan observasi dan wawancara terkait proses pencatatan stok di Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan;
- i) Lakukan wawancara ke pihak yang bertanggungjawab atau analisis jika ada permasalahan atau ketidaksesuaian antara pencatatan dan jumlah stok vaksin;
- j) Atas stock yang masih menumpuk secara significant, minta penjelasan dengan Pimpinan EP terkait;
- k) Apabila atas vaksin yang tidak bisa dijelaskan, penanggung jawab tidak bersedia membuat surat pernyataan tanggung jawab, agar yang bersangkutan membuat surat keterangan akan melakukan penelusuran atas vaksin tersebut;
- l) Tuangkan langkah kerja 4 dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik;
- m) Format Berita Acara pada poin 11 minimal ditandatangani oleh pengelola farmasi pada EP-Kako dan auditor yang melakukan cek fisik serta diketahui oleh Pimpinan EP-Kako; dan
- n) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.

3. EP Level Fasyankes

a. Survey Pendahuluan

- 1) Mengumpulkan dokumen/ informasi mengenai:
 - a) Struktur organisasi pengelola stok vaksin COVID-19 tingkat EP-Fasyankes;
 - b) Jumlah realisasi penerimaan vaksin dari provinsi *dan/atau* Kabupaten/Kota;
 - c) Jumlah vaksin yang sudah didistribusikan ke Fasyankes lain (jika ada);
 - d) Data realisasi penggunaan vaksin COVID-19 (penerimaan, konsumsi, dan pengembalian) di level EP-Fasyankes;
 - e) Tata Kelola (kebijakan, prosedur, dan kelembagaan) persediaan Vaksin COVID-19 yang dibuat sendiri oleh EP-Fasyankes terkait;

- 2) Lakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen di atas untuk memperoleh pemahaman atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pengawasan;
- 3) Pemahaman atas mitra pengawasan juga dapat dilakukan dengan cara mengundang ekspose atau wawancara dengan pihak mitra pengawasan; dan
- 4) Buat kesimpulan hasil Survey Pendahuluan.

b. *Tentative Audit Objective (TAO) di level Fasyankes*

Tentative Audit Objective (TAO) di EP-Fasyankes dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) EP-Fasyankes tidak menerima jumlah dan jenis vaksin yang sesuai dengan alokasi;
- 2) Pencatatan/administrasi persediaan vaksin (penerimaan, konsumsi, dan pengembalian distribusi) di EP-Fasyankes tidak terekam secara elektronik dengan tertib;
- 3) Jika tidak dapat melakukan pencatatan secara real time melalui aplikasi SMILE sebagaimana TAO huruf b, EP-Fasyankes juga tidak melakukan pencatatan/administrasi manual atas persediaan vaksin (penerimaan, konsumsi, dan pengembalian distribusi) dengan tertib;
- 4) Terdapat anomali konsumsi vaksin dibandingkan dengan jumlah orang yang telah dilakukan vaksinasi; dan
- 5) Terdapat selisih hasil stock opname dengan catatan hasil *output SMILE* terkait sisa persediaan vaksin di EP-Fasyankes yang tidak dapat dijelaskan.

Terhadap TAO tersebut di atas masih dapat ditambahkan oleh APIP apabila ditemukan hal-hal penting lainnya namun masih dalam lingkup pengawasan.

Terkait TAO tersebut diatas dilakukan pengawasan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

- 1) TAO: EP-Fasyankes tidak menerima jumlah dan jenis vaksin yang sesuai dengan alokasi dari Pusat (*Buffer Stock*), EP-Provinsi dan/atau EP-KAKO;

Tujuan pengawasan: memastikan jumlah dan jenis vaksin yang diterima oleh EP-Fasyankes telah sesuai dengan alokasi.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen/surat alokasi distribusi vaksin dari Kementerian Kesehatan/Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b) Dapatkan dokumen SBBK dari EP level di atasnya;
 - c) Dapatkan laporan persediaan (kartu catatan persediaan);
 - d) Bandingkan dokumen alokasi vaksin dengan SBBK dan laporan persediaan;
 - e) Telusuri apakah terjadi penerimaan vaksin di luar dokumen/surat alokasi distribusi vaksin dari Kementerian Kesehatan/Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - f) Lakukan wawancara dengan pihak terkait dan analisis jika ada permasalahan terkait ketidaksesuaian untuk mengetahui penyebabnya; dan
 - g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.
- 2) TAO: Pencatatan/administrasi persediaan vaksin (penerimaan, konsumsi, dan pengembalian distribusi) di EP-Fasyankes tidak terekam secara elektronik dengan tertib.

Tujuan pengawasan: memastikan pencatatan persediaan di EP-Fasyankes telah dilakukan melalui aplikasi *SMILE* sesuai dengan ketentuan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen penerimaan berupa SBBK atau BAST dari EP-Provinsi dan/atau EP-Kako atas distribusi vaksin ke EP-Fasyankes, dan pastikan kesesuaian informasi tersebut dengan informasi pada pencatatan penerimaan pada aplikasi *SMILE*;
- b) Dapatkan data pengembalian distribusi vaksin dari EP-Fasyankes ke EP-Provinsi dan EP-Kako, dan pastikan kesesuaian informasi data tersebut dengan informasi pada pencatatan pengembalian distribusi vaksin di aplikasi *SMILE*;
- c) Lakukan sampling data konsumsi vaksin pada EP-Fasyankes yang digunakan oleh EP-Fasyankes, fasyankes pelanggan, atau sentra vaksinasi yang tidak memiliki akun *SMILE* untuk memastikan kesesuaian informasi data tersebut dengan informasi pada pencatatan konsumsi di aplikasi *SMILE*;

- d) Dapatkan data pembuangan vaksin di EP-Fasyankes, dan pastikan kesesuaian informasi data tersebut dengan informasi pada pembuangan vaksin di aplikasi *SMILE*;
 - e) Catat jika terdapat ketidaksesuaian dan identifikasi permasalahannya;
 - f) Lakukan wawancara dengan pihak terkait dan analisis jika ada permasalahan untuk mengetahui penyebabnya; dan
 - g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.
- 3) TAO: Jika tidak dapat melakukan pencatatan secara real time melalui aplikasi *SMILE* sebagaimana TAO huruf b, EP-Fasyankes tidak melakukan pencatatan/administrasi manual atas persediaan vaksin (penerimaan, konsumsi, dan pengembalian distribusi) dengan tertib.

Tujuan Pengawasan: memastikan EP-Fasyankes tertib melakukan administrasi dan persediaan (penerimaan, konsumsi, dan pengembalian distribusi) vaksin.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen laporan rekapitulasi logistik vaksinasi COVID-19 tingkat puskesmas/fasyankes/pos secara harian;
- b) Dapatkan seluruh dokumen penerimaan SBBK dari EP diatasnya, BAST pengembalian, BA pembuangan;
- c) Uji kesesuaian antara laporan sebagaimana pada poin 1 dengan dokumen pendukungnya antara lain SBBK, BAST pengembalian, BA pembuangan;
- d) Catat jika terdapat item yang tidak didukung oleh bukti yang memadai;
- e) Teliti apakah pencatatan/administrasi manual atas persediaan vaksin (penerimaan, konsumsi, dan pengembalian distribusi) sesegera mungkin diinput dalam aplikasi *SMILE* (definisi sesegera mungkin diserahkan kepada auditor judgement sesuai kondisi di lapangan);
- f) Lakukan wawancara dengan pihak terkait dan analisis jika ada permasalahan untuk mengetahui penyebabnya; dan
- g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.

- 4) TAO: Terdapat anomali konsumsi vaksin dibandingkan dengan jumlah orang yang telah dilakukan vaksinasi (sebelum dilakukan *stock opname*).

Tujuan Pengawasan: memastikan efisiensi penggunaan vaksin COVID-19.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan laporan/data jumlah orang yang telah dilakukan vaksinasi di EP-Fasyankes tersebut dari aplikasi P-CARE;
 - b) Dapatkan laporan/data konsumsi di EP-Fasyankes sesuai aplikasi *SMILE*;
 - c) Dapatkan laporan/data penggunaan ADS (alat suntik) di EP-Fasyankes sesuai aplikasi *SMILE*;
 - d) Uji/bandingkan dokumen yang diperoleh pada poin 1 dengan poin 2 dan poin 3 di fasyankes tersebut per tanggal yang sama, teliti apakah jumlah vaksin dan ADS (alat suntik) yang dikonsumsi/digunakan telah sesuai dengan jumlah orang yang telah dilakukan vaksinasi (sesuai data P-Care);
 - e) Catat persentase perbedaan antara laporan konsumsi vaksin dan penggunaan ADS (alat suntik) dengan jumlah sasaran yang disuntikan di EP-Fasyankes tersebut pada tanggal yang sama;
 - f) Telusuri penyebab jika terdapat penggunaan ADS (alat suntik) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sasaran yang disuntik (khususnya terkait dengan pemberian vaksin *booster* diluar sasaran yang ditetapkan dan tidak dilakukan pencatatan melalui P-Care);
 - g) Lakukan wawancara dengan pihak terkait dan analisis permasalahan jika persentasenya tinggi untuk mengetahui penyebabnya; dan
 - h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.
- 5) TAO: Terdapat selisih hasil *stock opname* dengan catatan hasil *output SMILE* terkait sisa persediaan vaksin pada EP-Fasyankes yang tidak dapat dijelaskan.

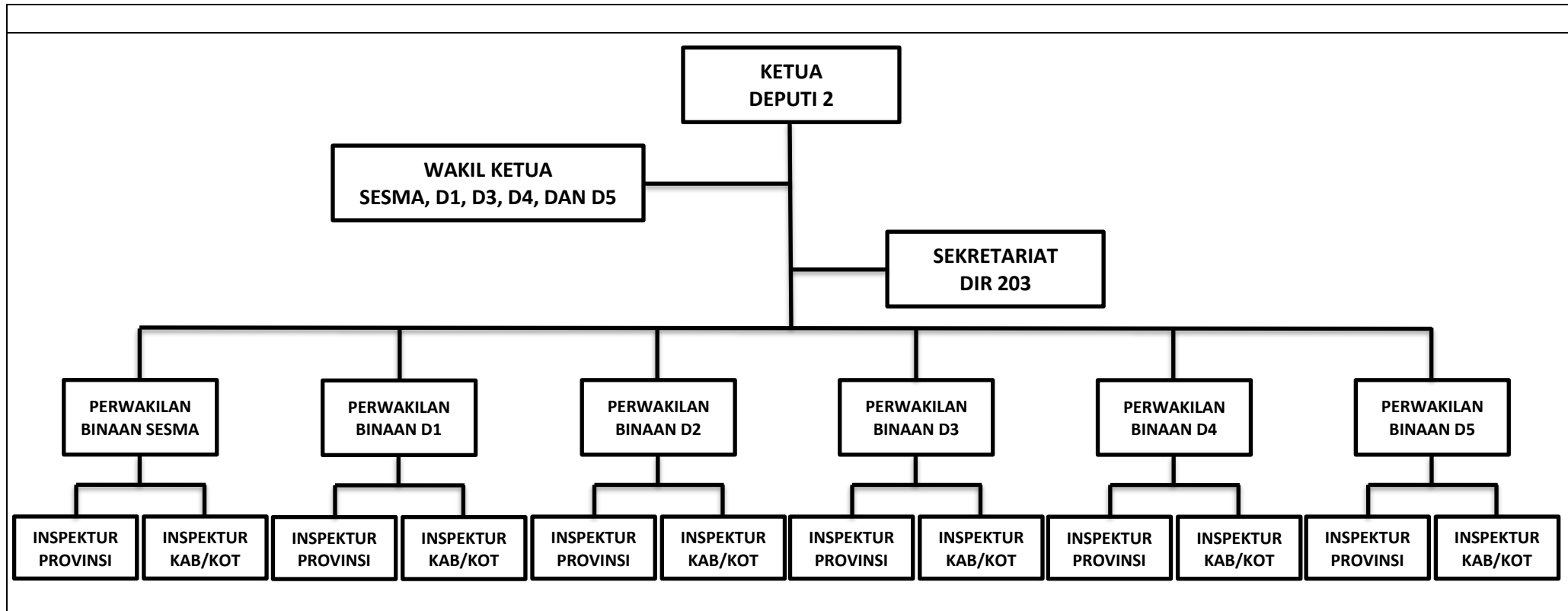
Tujuan Pengawasan: memastikan pencatatan/pelaporan stok vaksin di EP-Fasyankes telah sesuai dengan catatan hasil *output SMILE* terkait sisa persediaan vaksin.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan catatan hasil *output SMILE* terkait sisa persediaan vaksin pada tanggal *cut off*.
- b) Dapatkan dokumen pendukung penerimaan, pengembalian distribusi, pembuangan dan konsumsi vaksin dari awal penerimaan sampai dengan tanggal *cut off*;
- c) Bandingkan dokumen yang diperoleh pada poin 1 dengan poin 2, teliti apakah catatan hasil *output SMILE* pada tanggal *cut off* telah didukung dengan dokumen;
- d) Lakukan *stock opname* vaksin di gudang farmasi fasyankes;
- e) Lakukan *traceback* mutasi keluar dan masuk vaksin serta masukkan hasilnya dalam Kertas kerja *stock opname* persediaan vaksin COVID-19 untuk mengetahui jumlah sisa persediaan vaksin pada tanggal *cut off*;
- f) Bandingkan hasil *stock opname* di gudang fasyankes dengan catatan hasil *output SMILE* yang telah dilakukan *traceback* mutasi keluar dan masuk vaksin sampai dengan tanggal *cut off*;
- g) Catat jika ada selisih antara pencatatan dan hasil *stock opname*;
- h) Lakukan observasi dan wawancara terkait proses pencatatan stok di fasyankes yang dilakukan pengawasan;
- i) Lakukan wawancara ke pihak yang bertanggungjawab atau analisis jika ada permasalahan atau ketidaksesuaian antara pencatatan dan jumlah stok vaksin;
- j) Apabila penjelasan ada yang menyatakan vaksin rusak, dibuang, agar penanggung jawab persediaan membuat surat pernyataan (bertanggung jawab atas vaksin rusak/dibuang/*expired*);
- k) Apabila terdapat keterangan bahwa jumlah yang dibuang/rusak/*expired* sangat significant, lakukan pendalaman untuk mendapatkan informasi penyebabnya (misalnya fasilitas penyimpanan, *vaccine carrier*, dll);
- l) Apabila atas vaksin yang tidak bisa dijelaskan, penanggung jawab tidak bersedia membuat surat pernyataan tanggung jawab, agar yang bersangkutan membuat surat keterangan akan melakukan penelusuran atas vaksin tersebut.;

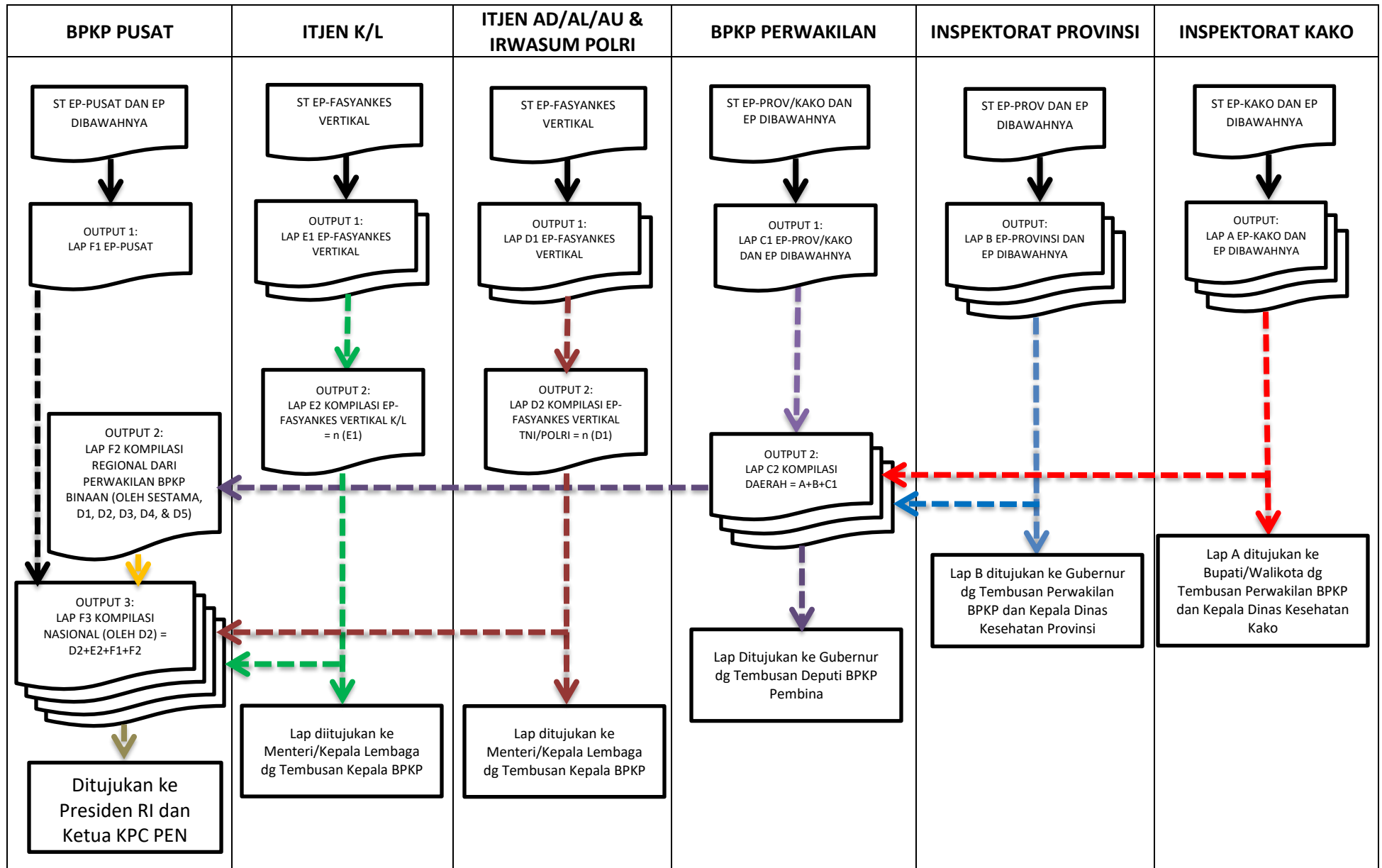
- m)* Atas *stock* yang masih menumpuk secara significant, minta penjelasan dengan Pimpinan EP terkait;
- n)* Tuangkan langkah kerja 4 dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik;
- o)* Format Berita Acara pada poin 14 minimal ditandatangani oleh pengelola farmasi pada EP-Fasyankes terkait dan auditor yang melakukan cek fisik serta diketahui oleh Pimpinan EP-Fasyankes; dan
- p)* Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.

**BAGAN STRUKTUR PENUGASAN DAN PELAPORAN
PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN VAKSIN COVID-19**



BPKP Perwakilan:

1. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal pelaksanaan Pengawasan Distribusi dan Stock Vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan arah dan kebijakan serta pedoman yang telah ditetapkan;
2. Melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan vaksinasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Mengoordinasikan teknis pelaksanaan pengawasan dan Quality Assurance di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, TNI, POLRI;
4. Menyampaikan laporan berkala pelaksanaan pengawasan kepada Ketua dan Wakil Ketua.



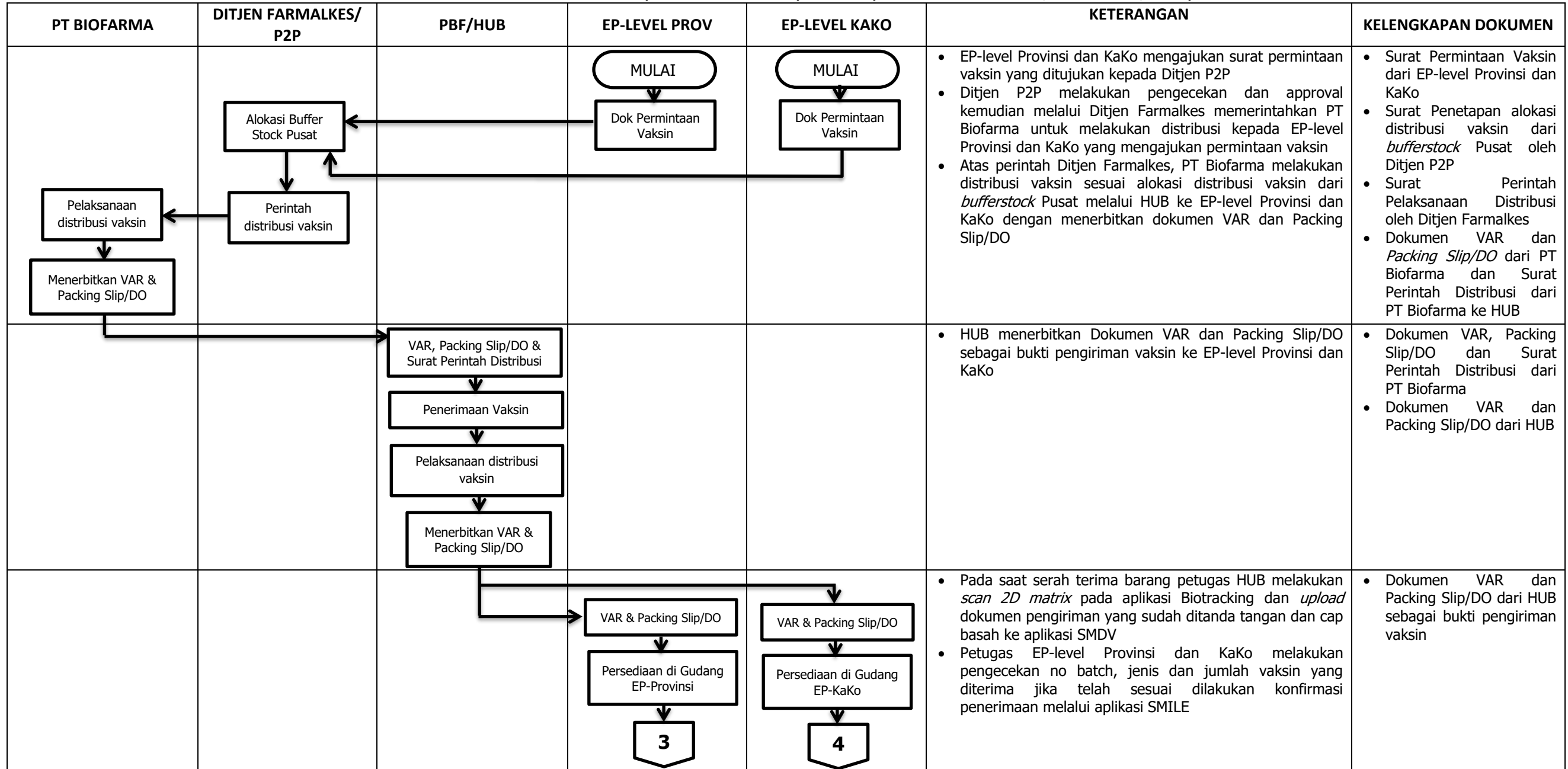
NO	APIP	RUANG LINGKUP PENUGASAN	TUJUAN SURAT TUGAS	OUTPUT (LAPORAN)	TUJUAN LAPORAN	TEMBUSAN LAPORAN
1	INSPEKTORAT KAKO	Dinas Kesehatan Kab/Kot (EP-KAKO), dengan sampling Fasyankes Kab/kota/swasta (EP-dibawahnya)	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pimpinan Fasyankes yang dijadikan sampling	Lap A Pemerintah Kako	Bupati/Walikota	a. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi; b. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan c. Inspektur Jenderal Kemendagri; d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2	INSPEKTORAT PROVINSI	Dinas Kesehatan Provinsi (EP-Provinsi), sampling Fasyankes provinsi/swasta (EP dibawahnya)	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Pimpinan Fasyankes yang dijadikan sampling	Lap B Pemerintah Provinsi	Gubernur	a. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi; b. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan c. Inspektur Jenderal Kemendagri; d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
3	PERWAKILAN BPKP	Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kot (EP-Pov/Kako) dengan Fasyankes Prov/Kab/Kot/Swasta (EP dibawahnya)	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pimpinan Fasyankes sampling	Lap A dan/atau B (EP- Prov/Kako)	Gubernur/Bupati/Walikota	
		Kompilasi Daerah		Lap C (Kompilasi Provinsi dan Kabupaten/Kota) = Lap A+B	Gubernur	a. Irjen Kemendagri; b. Deputi Kepala BPKP Pembina c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

N O	APIP	RUANG LINGKUP PENUGASAN	TUJUAN SURAT TUGAS	OUTPUT (LAPORAN)	TUJUAN LAPORAN	TEMBUSAN LAPORAN
4.	ITJEN K/L	Fasyankes Vertikal (EP-Fasyankes)	Pimpinan Fasyankes Vertikal	Lap D1 (Fasyankes Vertikal)	Pimpinan Fasyankes Vertikal	
		Kompilasi Fasyankes Vertikal K/L	Menteri/Kepala Lembaga	Lap D2	Menteri/Kepala Lembaga	Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK (D2)
5.	ITJEN AD/AL/AU & IRWASUM POLRI	Fasyankes Vertikal (EP-Fasyankes)	Pimpinan Fasyankes Vertikal	Lap E1 (Fasyankes Vertikal)	Pimpinan Fasyankes Vertikal	
		Kompilasi Fasyankes Vertikal K/L	Menteri/Kepala Lembaga	Lap E2	Menteri/Kepala Lembaga	Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK (D2)
6.	BPKP PUSAT	Ditjen P2P, Ditjen Farmalkes, PT Biofarma (EP-Pusat)	a. Dirjen P2P b. Dirjen Farmalkes Direksi PT Biofarma (Persero)	Lap F1 (EP-Pusat)	Menteri Kesehatan	a. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan b. Direksi PT Biofarma (Persero)
		Kompilasi Regional		Lap F2 (Lap Kompilasi tiap Provinsi Binaan)	Sestama, D1, D2, D3, D4 dan D5 BPKP	Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK (D2)
		Kompilasi Laporan Nasional		Lap F3=D2+E2+F1+F2 (Kompilasi Nasional)	Presiden	Menko Perekonomian selaku Ka KPC-PEN, Mendagri dan Menkes

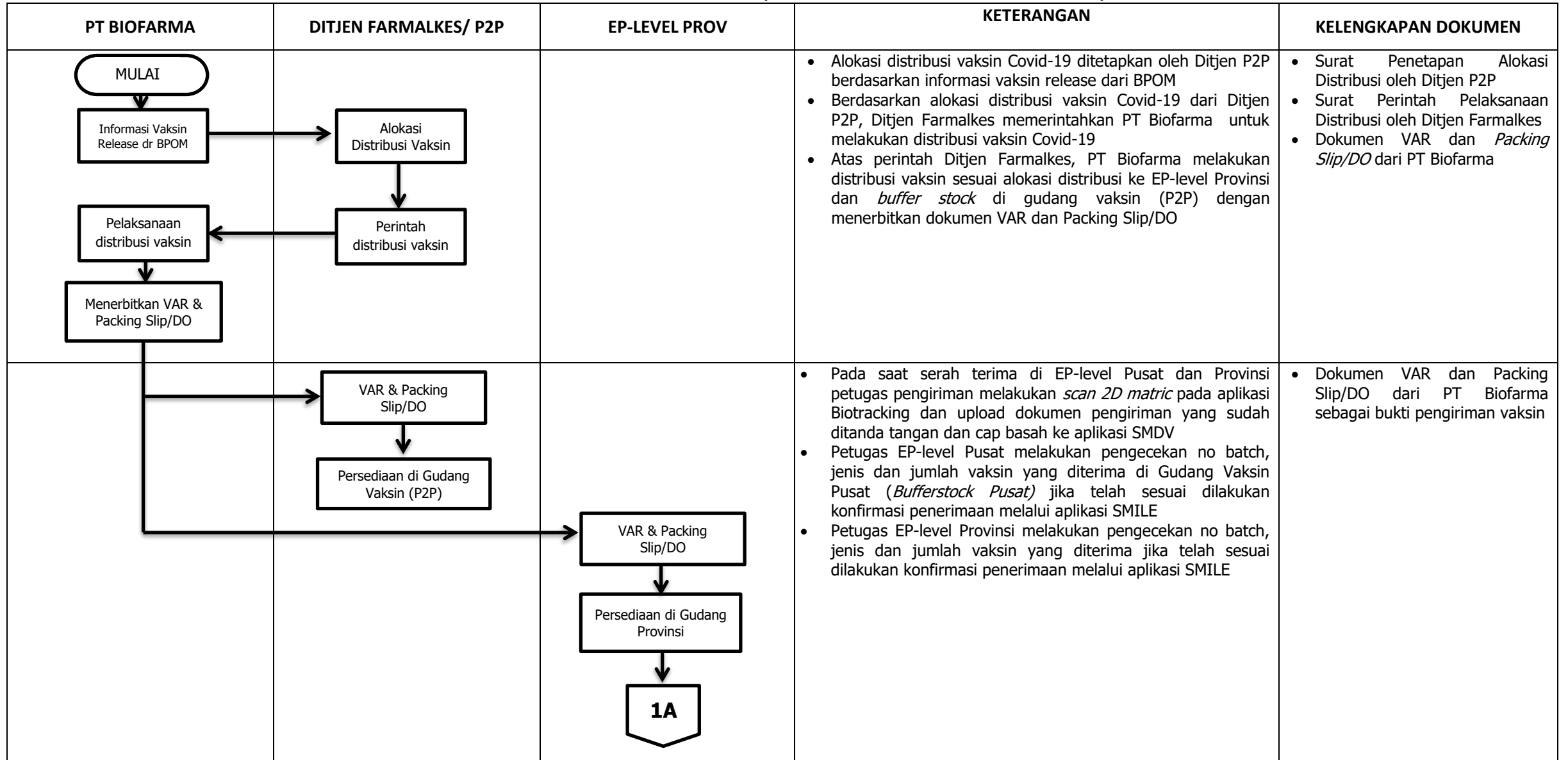
ALUR DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19
TINGKAT EP-LEVEL PUSAT REGULAR (DARI PT BIOFARMA/PENYEDIA KE EP-LEVEL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)

PT BIOFARMA	DITJEN FARMALKES/ P2P	HUB	EP-LEVEL PROV	EP-LEVEL KAKO	KETERANGAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
MULAI Informasi Vaksin Release dr BPOM Pelaksanaan distribusi vaksin Menerbitkan VAR & Packing Slip/DO	Alokasi Distribusi Vaksin Perintah distribusi vaksin VAR & Packing Slip/DO Persediaan Buffer di Gudang Vaksin (P2P)				- Alokasi distribusi vaksin Covid-19 ditetapkan oleh Ditjen P2P berdasarkan informasi vaksin release dari BPOM - Berdasarkan alokasi distribusi vaksin Covid-19 dari Ditjen P2P, Ditjen Farmalkes memerintahkan PT Biofarma untuk melakukan distribusi vaksin Covid-19 - Atas perintah Ditjen Farmalkes, PT Biofarma melakukan distribusi vaksin sesuai alokasi distribusi melalui HUB ke EP-level Provinsi dan KaKo dan <i>buffer stock</i> di gudang vaksin (P2P) dengan menerbitkan dokumen VAR dan Packing Slip/DO - Pada saat serah terima petugas pengiriman melakukan <i>scan 2D matrix</i> pada aplikasi Biotracking dan upload dokumen pengiriman yang sudah ditanda tangan dan cap basah ke aplikasi SMDV - Petugas EP-level Pusat melakukan pengecekan no batch, jenis dan jumlah vaksin yang diterima di Gudang Vaksin Pusat (<i>Bufferstock Pusat</i>) jika telah sesuai dilakukan konfirmasi penerimaan melalui aplikasi SMILE	- Surat Penetapan Alokasi Distribusi oleh Ditjen P2P - Surat Perintah Pelaksanaan Distribusi oleh Ditjen Farmalkes - Dokumen VAR dan <i>Packing Slip/DO</i> dari PT Biofarma sebagai bukti pengiriman vaksin, dan Surat Perintah Distribusi dari PT Biofarma ke HUB untuk pengiriman ke EP-level Provinsi dan KaKo
		VAR, Packing Slip/DO & Surat Perintah Distribusi Penerimaan Vaksin Pelaksanaan distribusi vaksin Menerbitkan VAR & Packing Slip/DO			- PT Biofarma mengirimkan vaksin ke HUB sebagai tempat transit sementara sebelum dilakukan distribusi ke EP-level Provinsi dan KaKo, kemudian memerintahkan HUB untuk melakukan distribusi sesuai dengan alokasi distribusi yang telah ditetapkan oleh Kemenkes - HUB melakukan distribusi vaksin dan menerbitkan Dokumen VAR dan Packing Slip/DO sebagai bukti pengiriman vaksin ke EP-level Provinsi dan KaKo	- Dokumen VAR, Packing Slip/DO dan Surat Perintah Distribusi dari PT Biofarma - Dokumen VAR dan Packing Slip/DO dari HUB
			VAR & Packing Slip/DO Persediaan di Gudang Provinsi 1	VAR & Packing Slip/DO Persediaan di Gudang KaKo 2	- Pada saat serah terima barang petugas HUB melakukan <i>scan 2D matrix</i> pada aplikasi Biotracking dan <i>upload</i> dokumen pengiriman yang sudah ditanda tangan dan cap basah ke aplikasi SMDV - Petugas EP-level Provinsi dan KaKo akan memperoleh notifikasi, kemudian melakukan pengecekan no batch, jenis dan jumlah vaksin yang diterima jika telah sesuai dilakukan konfirmasi penerimaan melalui aplikasi SMILE	Dokumen VAR dan Packing Slip/DO dari HUB sebagai bukti pengiriman vaksin

ALUR DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19
TINGKAT EP-LEVEL PUSAT KHUSUS (DARI PT BIOFARMA (PENYEDIA) KE EP-LEVEL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)

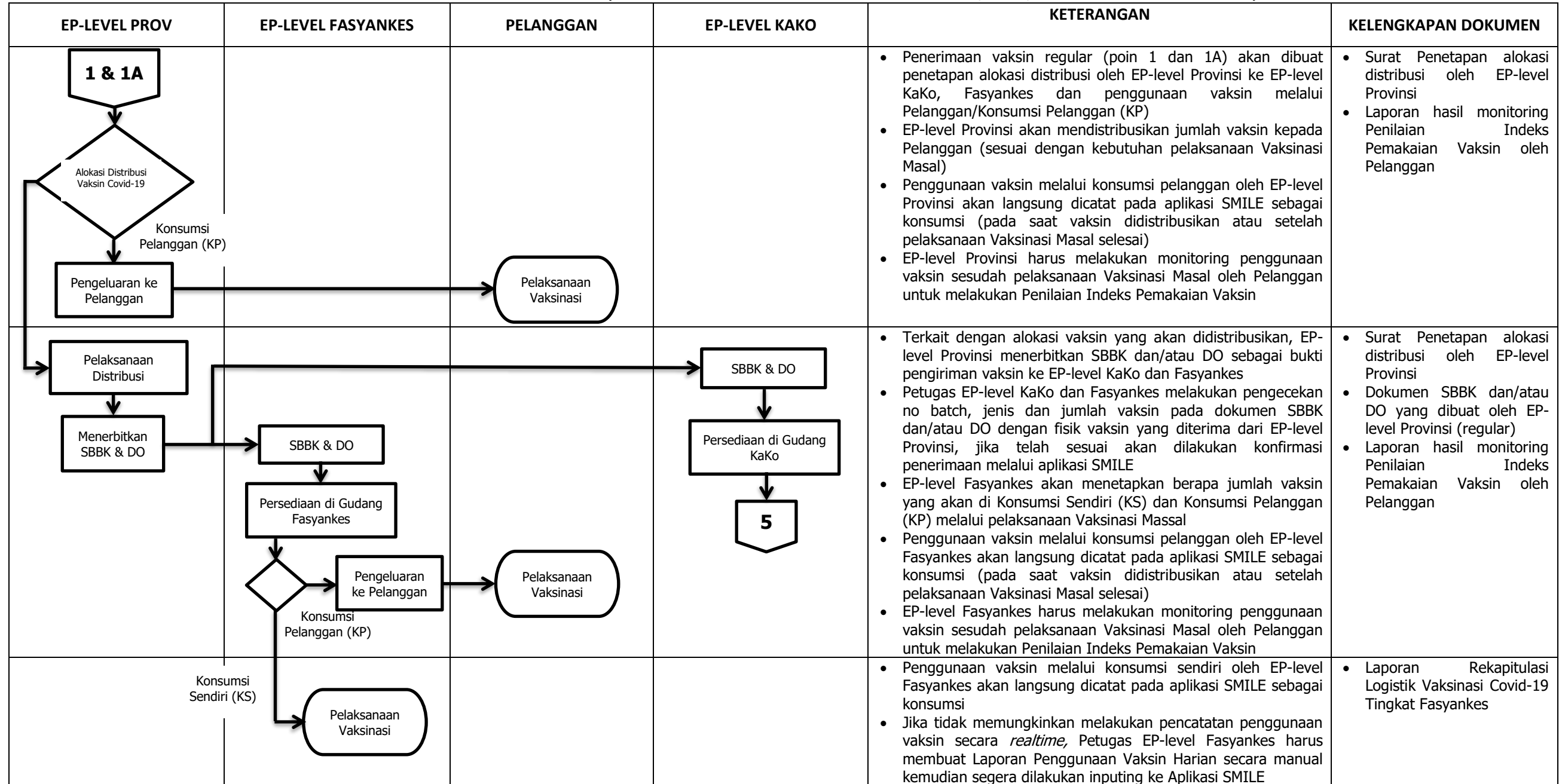


ALUR DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19
TINGKAT EP-LEVEL PUSAT TANPA HUB (DARI PT BIOFARMA KE EP-LEVEL PROVINSI)



ALUR DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19

TINGKAT EP-LEVEL PROVINSI REGULAR (DARI EP-LEVEL PROVINSI KE EP-LEVEL KABUPATEN/KOTA/FASYANKES DAN PELANGGAN)

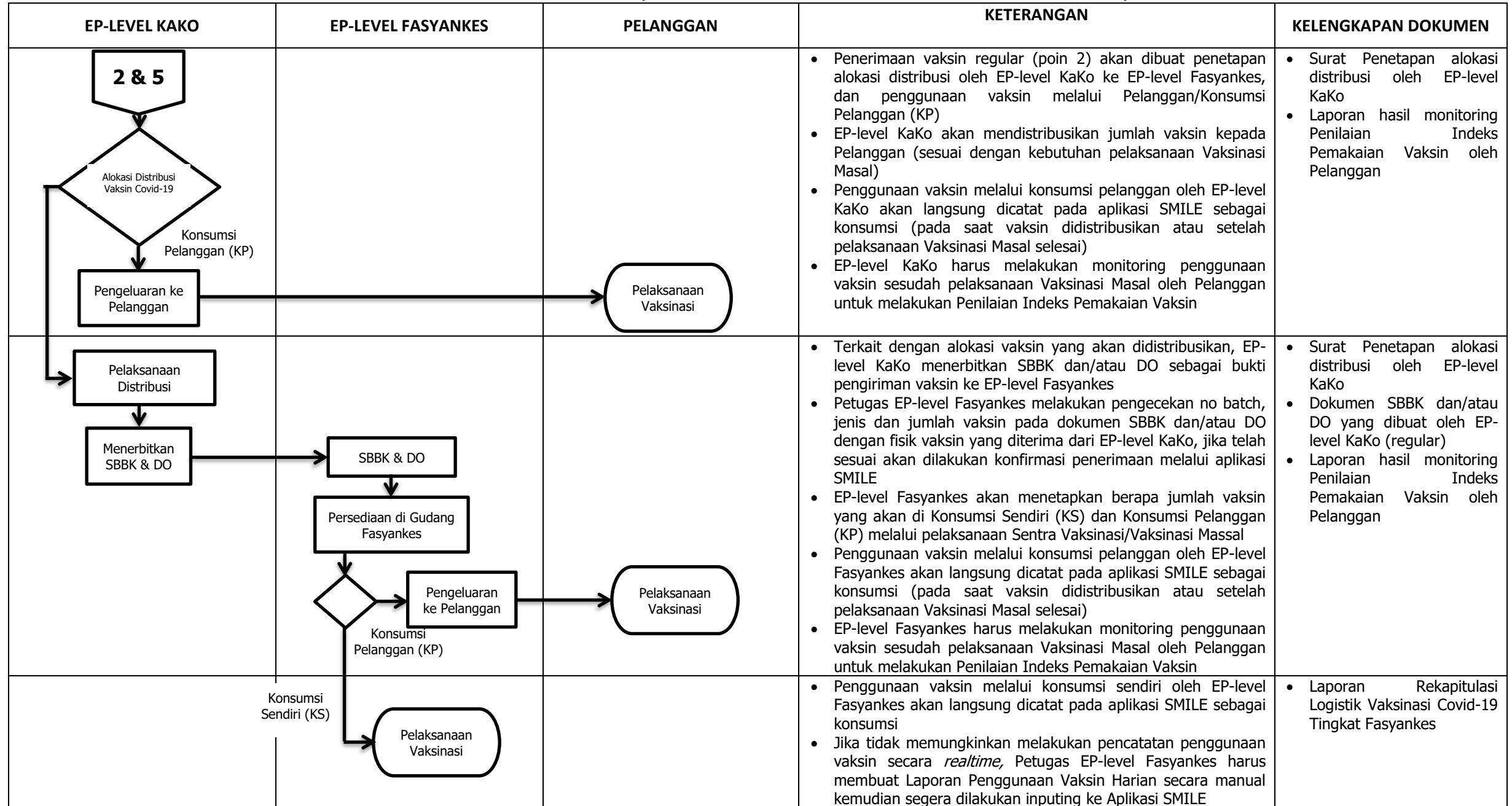


ALUR DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19

TINGKAT EP-LEVEL PROVINSI KHUSUS (DARI EP-LEVEL PROVINSI KE EP-LEVEL FASYANKES DAN PELANGGAN)

EP-LEVEL PROVINSI	EP-LEVEL FASYANKES	PELANGGAN	KETERANGAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
<pre> graph TD A{{3}} --> B[Alokasi distribusi EP-level Pusat] B -- "Konsumsi Pelanggan (KP)" --> C[Pengeluaran ke Pelanggan] C --> D([Pelaksanaan Vaksinasi]) </pre>			- Penerimaan vaksin khusus (poin 3) bisa berasal dari permintaan khusus dari EP-level Provinsi maupun Fasyankes - Atas permintaan khusus dari EP-level Provinsi akan mendistribusikan jumlah vaksin kepada Pelanggan (sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Vaksinasi Masal) - Penggunaan vaksin melalui konsumsi pelanggan oleh EP-level Provinsi akan langsung dicatat pada aplikasi SMILE sebagai konsumsi (pada saat vaksin didistribusikan atau setelah pelaksanaan Vaksinasi Masal selesai) - EP-level Provinsi harus melakukan monitoring penggunaan vaksin sesudah pelaksanaan Vaksinasi Masal oleh Pelanggan untuk melakukan Penilaian Indeks Pemakaian Vaksin	- Surat Penetapan alokasi distribusi oleh EP-level Pusat (permintaan khusus dari <i>bufferstock</i>) - Laporan hasil monitoring Penilaian Indeks Pemakaian Vaksin oleh Pelanggan
<pre> graph TD A[Pelaksanaan distribusi vaksin sesuai alokasi EP-level Pusat] --> B[Menerbitkan SBBK & DO] B --> C[SBBK & DO] C --> D[Persediaan di Gudang Fasyankes] D --> E{ } E -- "Konsumsi Pelanggan (KP)" --> F[Pengeluaran ke Pelanggan] F --> G([Pelaksanaan Vaksinasi]) E --> H([Pelaksanaan Vaksinasi]) </pre>			- Atas permintaan khusus dari EP-level Fasyankes akan langsung dilakukan distribusi sesuai dengan penetapan alokasi oleh EP-level Pusat/P2P (<i>BufferStock</i>) dengan menerbitkan SBBK dan/atau DO sebagai bukti pengiriman vaksin ke EP-level Fasyankes (selaku pihak yang mengajukan permintaan) - Petugas EP-level Fasyankes melakukan pengecekan no batch, jenis dan jumlah vaksin pada dokumen SBBK dan/atau DO dengan fisik vaksin yang diterima dari EP-level Provinsi, jika telah sesuai akan dilakukan konfirmasi penerimaan melalui aplikasi SMILE - EP-level Fasyankes akan menetapkan berapa jumlah vaksin yang akan di Konsumsi Sendiri (KS) dan Konsumsi Pelanggan (KP) melalui pelaksanaan Vaksinasi Masal - Penggunaan vaksin melalui konsumsi pelanggan oleh EP-level Fasyankes akan langsung dicatat pada aplikasi SMILE sebagai konsumsi (pada saat vaksin didistribusikan atau setelah pelaksanaan Vaksinasi Masal selesai) - EP-level Fasyankes harus melakukan monitoring penggunaan vaksin sesudah pelaksanaan Vaksinasi Masal oleh Pelanggan untuk melakukan Penilaian Indeks Pemakaian Vaksin	- Dokumen SBBK dan/atau DO yang dibuat oleh EP-level Provinsi (khusus) - Laporan hasil monitoring Penilaian Indeks Pemakaian Vaksin oleh Pelanggan
	Konsumsi Sendiri (KS)		- Penggunaan vaksin melalui konsumsi sendiri oleh EP-level Fasyankes akan langsung dicatat pada aplikasi SMILE sebagai konsumsi - Jika tidak memungkinkan melakukan pencatatan penggunaan vaksin secara <i>realtime</i>, Petugas EP-level Fasyankes harus membuat Laporan Penggunaan Vaksin Harian secara manual kemudian segera dilakukan inputing ke Aplikasi SMILE	Laporan Rekapitulasi Logistik Vaksinasi Covid-19 Tingkat Fasyankes

ALUR DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19
TINGKAT EP-LEVEL KAKO REGULAR (DARI EP-LEVEL KAKO KE EP-LEVEL FASYANKES DAN PELANGGAN)



ALUR DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19
TINGKAT EP-LEVEL KAKO KHUSUS (DARI EP-LEVEL KAKO KE EP-LEVEL FASYANKES DAN PELANGGAN)

EP-LEVEL KAKO	EP-LEVEL FASYANKES	PELANGGAN	KETERANGAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
<pre> graph TD 4{{4}} --> A[Alokasi distribusi EP-level Pusat] A -- "Konsumsi Pelanggan (KP)" --> B[Pengeluaran ke Pelanggan] B --> C([Pelaksanaan Vaksinasi]) </pre>			- Penerimaan vaksin khusus (poin 4) bisa berasal dari permintaan khusus dari EP-level KaKo maupun Fasyankes - Atas permintaan khusus dari EP-level KaKo akan mendistribusikan jumlah vaksin kepada Pelanggan (sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Vaksinasi Masal) - Penggunaan vaksin melalui konsumsi pelanggan oleh EP-level KaKo akan langsung dicatat pada aplikasi SMILE sebagai konsumsi (pada saat vaksin didistribusikan atau setelah pelaksanaan Vaksinasi Masal selesai) - EP-level KaKo harus melakukan monitoring penggunaan vaksin sesudah pelaksanaan Vaksinasi Masal oleh Pelanggan untuk melakukan Penilaian Indeks Pemakaian Vaksin	- Surat Penetapan alokasi distribusi oleh EP-level Pusat (permintaan khusus dari <i>bufferstock</i>) - Laporan hasil monitoring Penilaian Indeks Pemakaian Vaksin oleh Pelanggan
<pre> graph TD D[Pelaksanaan distribusi vaksin sesuai alokasi EP-level Pusat] --> E[Menerbitkan SBBK & DO] E --> F[SBBK & DO] F --> G[Persediaan di Gudang Fasyankes] G --> H{ } H -- "Konsumsi Pelanggan (KP)" --> I[Pengeluaran ke Pelanggan] I --> J([Pelaksanaan Vaksinasi]) H --> K([Pelaksanaan Vaksinasi]) </pre>			- Atas permintaan khusus dari EP-level Fasyankes akan langsung dilakukan distribusi sesuai dengan penetapan alokasi oleh EP-level Pusat/P2P (<i>BufferStock</i>) dengan menerbitkan SBBK dan/atau DO sebagai bukti pengiriman vaksin ke EP-level Fasyankes (selaku pihak yang mengajukan permintaan) - Petugas EP-level Fasyankes melakukan pengecekan no batch, jenis dan jumlah vaksin pada dokumen SBBK dan/atau DO dengan fisik vaksin yang diterima dari EP-level Provinsi, jika telah sesuai akan dilakukan konfirmasi penerimaan melalui aplikasi SMILE - EP-level Fasyankes akan menetapkan berapa jumlah vaksin yang akan di Konsumsi Sendiri (KS) dan Konsumsi Pelanggan (KP) melalui pelaksanaan Vaksinasi Masal - Penggunaan vaksin melalui konsumsi pelanggan oleh EP-level Fasyankes akan langsung dicatat pada aplikasi SMILE sebagai konsumsi (pada saat vaksin didistribusikan atau setelah pelaksanaan Vaksinasi Masal selesai) - EP-level Fasyankes harus melakukan monitoring penggunaan vaksin sesudah pelaksanaan Vaksinasi Masal oleh Pelanggan untuk melakukan Penilaian Indeks Pemakaian Vaksin	- Dokumen SBBK dan/atau DO yang dibuat oleh EP-level KaKo (khusus) - Laporan hasil monitoring Penilaian Indeks Pemakaian Vaksin oleh Pelanggan
	<pre> graph TD H -- "Konsumsi Sendiri (KS)" --> L([Pelaksanaan Vaksinasi]) </pre>		- Penggunaan vaksin melalui konsumsi sendiri oleh EP-level Fasyankes akan langsung dicatat pada aplikasi SMILE sebagai konsumsi - Jika tidak memungkinkan melakukan pencatatan penggunaan vaksin secara <i>realtime</i>, Petugas EP-level Fasyankes harus membuat Laporan Penggunaan Vaksin Harian secara manual kemudian segera dilakukan inputing ke Aplikasi SMILE	Laporan Rekapitulasi Logistik Vaksinasi Covid-19 Tingkat Fasyankes

Lampiran Pedoman Pengawasan No 3

(FORMAT LAPORAN A/B)

LOGO/KOP APIP PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Identitas dan Alamat APIP

LAPORAN HASIL AUDIT TUJUAN TERTENTU
ATAS PELAKSANAAN DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN
VAKSIN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA
DINAS KESEHATAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....
PER 31 AGUSTUS 2021 (*tanggal cut off*)

NOMOR :

TANGGAL : 2021

(FORMAT LAPORAN A/B)

LOGO/KOP APIP PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Identitas dan Alamat APIP

Nomor : 2021

Lampiran :

Hal : Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) pada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota..... per 31 Agustus 2021 (*tanggal cut off*)

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota.....
di ...

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) pada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.....per 31 Agustus 2021 (*tanggal cut off*), dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan Audit

Dasar pelaksanaan audit adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) , sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) .
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10

Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
- e. Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP- /D2/03/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- f. Surat Tugas Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor ST-.....tanggal.....perihal
- g. Surat Tugas Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota..... Nomor ST-..... tanggal perihal

2. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas distribusi vaksin covid-19 dan pengelolaan persediaan vaksin *coronavirus disease 2019 (COVID-19)* dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan pengendalian yang ditemui.

3. Sasaran dan ruang lingkup audit

Sasaran audit meliputi Penilaian terhadap 4 tepat yaitu tepat sasaran/tujuan distribusi, tepat jumlah dan jenis, tepat waktu pengiriman, serta tepat administrasi atas distribusi vaksin covid-19 dan pengelolaan persediaan vaksin *coronavirus disease 2019 (COVID-19)* pada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Ruang lingkup audit terdiri dari pelaksanaan distribusi dan pengelolaan persediaan vaksin program covid-19 pada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.... dan akuntabilitas pengelolaan persediaan pada (jumlah) EP Fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang berada di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota.....

4. Batasan Tanggung Jawab

Auditor hanya bertanggung jawab sebatas simpulan hasil audit. Kebenaran dan validitas dokumen yang disampaikan kepada auditor

sebagai dasar pengambilan simpulan menjadi tanggung jawab manajemen atau pihak-pihak terkait yang menyampaikan dokumen.

5. Metodologi Audit

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Dalam melaksanakan audit, diutamakan menggunakan metodologi yang sesuai dengan sifat penugasan yang dilakukan, antara lain dengan:

- a. Reviu dokumen;
- b. Pemeriksaan fisik/stok opname;
- c. Wawancara/konfirmasi;
- d. Observasi;
- e. Prosedur analitis;
- f. Prosedur audit lainnya yang relevan.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, dilakukan pendalaman/identifikasi permasalahan apabila kondisi tidak sesuai kriteria. Selanjutnya, terhadap kondisi tidak sesuai kriteria tersebut, tim audit melakukan identifikasi permasalahan, analisis permasalahan, identifikasi penyebab dan akibat, dan melakukan perumusan rekomendasi yang sesuai.

6. Waktu Pelaksanaan Audit

Sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota..... Nomor ST-..... tanggal perihal, pelaksanaan audit atas Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) pada Provinsi/Kabupaten/Kota..... per 31 Agustus 2021 (*tanggal cut off*) dilaksanakan selama Hari Penugasan mulai tanggal.... sampai dengan tanggal....

7. Informasi Umum

a. Identitas auditan

Pemeriksaan atas akuntabilitas distribusi vaksin covid-19 dan pengelolaan persediaan dilakukan pada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.... dengan rincian sebagai berikut:

1.	Nama EP Provinsi/Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota xxx
----	------------------------------------	--

2.	Alamat Kantor	
3.	Nama Pimpinan Dinas Kesehatan	

Adapun EP Fasyankes yang telah dilakukan pengujian atas pengelolaan persediaan di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota.... adalah sebagai berikut:

Tabel 1:

No	Jenis Fasyankes	Nama Fasyankes	Alamat Fasyankes
1.	Puskesmas	a. Puskesmas xxx	
		b. Puskesmas xyz	
2.	RS Vertikal		
3.	EP Fasyankes Lainnya (<i>Memiliki Akun SMILE</i>)		

b. Pencatatan yang dilakukan pengujian pada EP Provinsi/Kako atas Vaksin program Covid-19 per 31 Agustus (*tanggal cut off audit*)
Pencatatan EP Provinsi/Kabupaten/kota... atas Vaksin program Covid-19 per 31 Agustus (*tanggal cut off audit*) yang dilakukan audit adalah sebagai berikut:

No	Jenis Vaksin	Total Penerimaan (dosis)	Penerimaan Pengembalian (dosis)	Total Distribusi (dosis)	Total Pengembalian Distribusi (dosis)	Total Pembuangan (dosis)	Total Konsumsi (dosis)	Sisa (dosis)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Coronavac							
2	Astrazeneca							
3	Moderna							
4	Pfizer							
5	Sinopharm (ex hibah UEA)							
6	Vaksin program Lainnya							
	Total							

sumber: output SMILE level Dinkes Provinsi/ Dinkes Kako Pemerintah Prov/Kab/Kota... per 31 Agustus 2021 (*tanggal cut off audit*)

c. Pencatatan yang dilakukan pengujian pada EP Fasyankes atas Vaksin program Covid-19 per 31 Agustus 2021 (*tanggal cut off audit*)
Pencatatan EP Fasyankes... atas Vaksin program Covid-19 per 31 Agustus 2021 (*tanggal cut off audit*) yang dilakukan audit adalah sebagai berikut:

1) Puskesmas A

No	Jenis Vaksin	Total Penerimaan (dosis)	Total Pengembalian Distribusi	Total Pembuangan	Total Konsumsi	Sisa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Coronavac					
2	Astrazeneca					
3	Moderna					
4	Pfizer					
5	Sinopharm (ex hibah UEA)					
6	Vaksin program Lainnya					
	Total					

sumber: Output SMILE level Puskesmas A per tanggal (cut off audit)

2) Puskesmas B

No	Jenis Vaksin	Total Penerimaan (dosis)	Total Pengembalian Distribusi	Total Pembuangan	Total Konsumsi	Sisa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Coronavac					
2	Astrazeneca					
3	Moderna					
4	Pfizer					
5	Sinopharm (ex hibah UEA)					
6	Vaksin program Lainnya					
	Total					

sumber: Output SMILE level Puskesmas B per tanggal (cut off audit)

**jumlah tabel disesuaikan dengan jumlah EP Fasyankes yang dilakukan audit*

8. Hasil audit.

a. Hasil Audit atas EP Provinsi/Kako atas Vaksin program Covid-19 per 31 Agustus 2021 (tanggal cut off audit)

Hasil Audit pada EP Provinsi/Kako atas pengelolaan distribusi dan pengelolaan stok Vaksin program Covid-19 per 31 Agustus 2021 (tanggal cut off audit) dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Hasil stok opname

Dari Hasil Stok Opname atas vaksin program di gudang farmasi EP Provinsi/Kabupaten/Kota per 31 Agustus 2021 (tanggal cut off audit), dapat dilaporkan sebagai berikut:

No.	Jenis Vaksin	Sisa Stok menurut SMILE (dosis)	Sisa Stok Audited (dosis)	Selisih (dosis)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Coronavac			
2.	Astrazeneca			
3.	Moderna			
4.	Pfizer			
5.	Sinopharm (ex hibah UEA)			
6.	Vaksin program Lainnya			
	Total			

Dari hasil stok opname, Terdapat selisih hasil stock opname dengan catatan hasil output SMILE terkait total sisa persediaan vaksin sebagai berikut:

**contoh penyajian:*

jika terdapat selisih total saldo stok vaksin menurut SMILE lebih besar dibanding dengan total saldo audited sebesar 400 dosis, dapat diuraikan sebagai berikut:

<i>a. Terdapat vaksin yang dibuang karena rusak/tidak layak yang tidak tercatat di SMILE (didukung dengan bukti fisik/Berita acara) (dosis)</i>	<i>50</i>
<i>b. Terdapat distribusi vaksin yang tidak tercatat di SMILE (didukung dengan bukti fisik/Berita acara) (dosis)</i>	<i>250</i>
<i>c. terdapat penerimaan vaksin yang belum diinput di</i>	<i>-100</i>

SMILE	
d terdapat selisih vaksin yang tidak dapat dijelaskan (dosis)	200
jumlah selisih	400

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

- a) ...
- b) ...

Akibatnya

- a) ...
- b) ...

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, terutama atas selisih yang tidak dapat dijelaskan telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai berikut (uraikan rencana tindak lanjut oleh mitra pengawasan):

- a) ...
- b) ...

2) **Penilaian ketepatan Jumlah dan Jenis vaksin**

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan Jumlah dan Jenis vaksin program yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi”.

Temuan terkait ketidaktepatan Jumlah dan Jenis vaksin, antara lain:

- a) EP-Provinsi/EP-Kako tidak menerima jumlah dan jenis vaksin yang sesuai dengan alokasi dari Pusat dan/ atau Provinsi;
- b) Distribusi vaksin dari EP-Provinsi/EP-Kako kepada EP di bawahnya dan/ atau pelanggan tidak tepat jumlah dan tepat jenis;
- c) Terdapat anomali konsumsi vaksin dibandingkan dengan jumlah orang yang telah dilakukan vaksinasi di EP- Provinsi/EP-Kako
- d) Jumlah vaksin carrier dan kapasitas vaksin carrier tidak memadai untuk pengiriman sesuai dengan target jumlah pengiriman

Selain TAO-TAO tersebut diatas, APIP dapat menambahkan temuan terkait ketidaktepatan Jumlah dan Jenis vaksin pada bagian ini.

Penyajian temuan yang meliputi “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi” dapat merujuk pada penyajian temuan hasil stok opname pada no 1.

3) Penilaian ketepatan sasaran/tujuan distribusi

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan sasaran/tujuan distribusi vaksin program yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi”.

Temuan terkait ketidaktepatan sasaran/tujuan distribusi, antara lain: *Distribusi vaksin dari EP-Provinsi/EP-Kako kepada EP di bawahnya dan/ atau pelanggan tidak tepat sasaran/ tujuan distribusi.*

Selain TAO tersebut diatas, APIP dapat menambahkan temuan terkait ketidaktepatan sasaran/tujuan distribusi pada bagian ini. Penyajian temuan yang meliputi “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi” dapat merujuk pada penyajian temuan hasil stok opname pada no 1.

4) Penilaian ketepatan Waktu

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan waktu distribusi vaksin program yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi”.

Temuan terkait ketidaktepatan waktu, antara lain: *Distribusi vaksin dari EP-Provinsi/EP-Kako kepada EP di bawahnya dan/ atau pelanggan tidak tepat waktu.*

Selain TAO tersebut diatas, APIP dapat menambahkan temuan terkait ketidaktepatan waktu pada bagian ini.

Penyajian temuan yang meliputi “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi” dapat merujuk pada penyajian temuan hasil stok opname pada no 1.

5) **Penilaian ketepatan Administrasi**

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan administrasi distribusi vaksin program yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi”.

Temuan terkait ketidaktepatan administrasi, antara lain *Pencatatan/administrasi persediaan vaksin (penerimaan, konsumsi, dan distribusi) di EP-Provinsi/EP-Kako tidak terekam secara elektronik dengan tertib*

Selain TAO-TAO tersebut diatas, APIP dapat menambahkan temuan terkait ketidaktepatan Administrasi pada bagian ini.

Penyajian temuan yang meliputi “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi” dapat merujuk pada penyajian temuan hasil stok opname pada no 1.

b. Hasil Audit EP Fasyankes atas Vaksin program Covid-19 per 31 Agustus 2021 (tanggal cut off audit)

Hasil Audit pada EP Fasyankes A dan B atas pengelolaan distribusi dan pengelolaan stok Vaksin program Covid-19 per 31 Agustus 2021 (tanggal cut off audit) dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Hasil stok opname

Dari Hasil Stok Opname atas vaksin program di gudang farmasi EP Fasyankes A dan B per 31 Agustus 2021 (tanggal cut off audit), dapat dilaporkan sebagai berikut:

a) Fasyankes A

No.	Jenis Vaksin	Sisa Stok menurut SMILE Per 31 Agustus 2021 (dosis)	Sisa Stok Audited Per 31 Agustus 2021 (dosis)	Selisih Per 31 Agustus 2021 (dosis)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Coronavac			
2.	Astrazeneca			
3.	Moderna			
4.	Pfizer			
5.	Sinopharm (ex hibah UEA)			
6.	Vaksin program			

No.	Jenis Vaksin	Sisa Stok menurut SMILE Per 31 Agustus 2021 (dosis)	Sisa Stok Audited Per 31 Agustus 2021 (dosis)	Selisih Per 31 Agustus 2021 (dosis)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Lainnya			
	Total			

Dari hasil stok opname, Terdapat selisih hasil stock opname dengan catatan hasil output SMILE terkait total sisa persediaan vaksin sebagai berikut:

**contoh penyajian:*
jika terdapat selisih total saldo stok vaksin menurut SMILE lebih besar dibanding dengan total saldo audited sebesar 400 dosis, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Terdapat vaksin yang dibuang karena rusak/tidak layak yang tidak tercatat di SMILE (didukung dengan bukti fisik/Berita acara) (dosis)	50
b. Terdapat konsumsi vaksin yang tidak tercatat di SMILE (didukung dengan bukti fisik/Berita acara) (dosis)	250
c. terdapat penerimaan vaksin yang belum diinput di SMILE	-100
d terdapat selisih vaksin yang tidak dapat dijelaskan (dosis)	200
jumlah selisih	400

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

- (1) ...
- (2) ...

Akibatnya.....

- (1) ...
- (2) ...

Sehubungan dengan permasalahan tersebut terutama atas selisih yang tidak dapat dijelaskan telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai berikut (uraikan rencana tindak lanjut oleh mitra pengawasan):

(1) ...

(2) ...

b) Fasyankes B

(Penyajian hasil stok opname fasyankes B disesuaikan seperti hasil stok opname fasyankes A di atas)

2) Penilaian ketepatan Jumlah dan Jenis vaksin

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan Jumlah dan Jenis vaksin program yang dijumpai dalam pelaksanaan audit pada Fasyankes A dan B. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi”.

Temuan terkait ketidaktepatan Jumlah dan Jenis vaksin , antara lain:

- a) EP-Fasyankes tidak menerima jumlah dan jenis vaksin yang sesuai dengan alokasi;*
- b) Terdapat anomali konsumsi vaksin dibandingkan dengan jumlah orang yang telah dilakukan vaksinasi;*
- c) Terdapat selisih hasil stock opname dengan catatan hasil output SMILE terkait sisa persediaan vaksin di EP-Fasyankes yang tidak dapat dijelaskan.*

Selain TAO-TAO tersebut diatas, APIP dapat menambahkan temuan terkait ketidaktepatan Jumlah dan Jenis vaksin pada bagian ini.

Penyajian temuan yang meliputi “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi” dapat merujuk pada penyajian temuan hasil stok opname pada no 1

3) Penilaian ketepatan Administrasi

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan Administrasi vaksin program yang dijumpai dalam pelaksanaan audit pada Fasyankes A dan B. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi”.

Temuan terkait ketidaktepatan administrasi, antara lain

- a) Pencatatan/administrasi persediaan vaksin (penerimaan, konsumsi, dan pengembalian distribusi) di EP-Fasyankes tidak terekam secara elektronik dengan tertib;*

b) Jika tidak dapat melakukan pencatatan secara real time melalui aplikasi SMILE sebagaimana TAO huruf b, EP-Fasyankes juga tidak melakukan pencatatan/administrasi manual atas persediaan vaksin (penerimaan, konsumsi, dan pengembalian distribusi) dengan tertib;

Penyajian temuan yang meliputi “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi” dapat merujuk pada penyajian temuan hasil stok opname pada no 1.

c. Indikasi Fraud

Hasil Audit pada EP Provinsi, EP Kako, EP Fasyankes A dan B atas pengelolaan distribusi dan pengelolaan stok Vaksin program Covid-19 per 31 Agustus 2021 (*tanggal cut off audit*) ditemukan adanya indikasi fraud yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Menguraikan permasalahan terkait dengan adanya indikasi fraud atas distribusi vaksin program dan pengelolaan persediaan vaksin Covid-19 yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi”.

Contoh temuan terkait indikasi fraud, antara lain:

(a) Penyalahgunaan wastage rate vaksin Covid-19

(b) Adanya dugaan vaksin hilang, diperjualbelikan, dan/atau tidak dapat dijelaskan

Penyajian temuan yang meliputi “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi” dapat merujuk pada penyajian temuan hasil stok opname.

d. Hal – hal yang perlu diperhatikan

Menguraikan permasalahan lain yang dijumpai dalam pelaksanaan audit di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan fasyankes di bawahnya seperti yang berkaitan dengan lemahnya tata kelola distribusi dan persediaan vaksin pada proses distribusi dan/atau pengelolaan persediaan vaksin di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Catatan: Apabila diperlukan dapat diberikan saran/rekomendasi kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menindaklanjuti hal – hal penting yang menjadi kewenangannya.

Demikian kami disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu Gubernur/Bupati/Walikota diucapkan terima kasih.

Inspektur
Provinsi/Kabupaten/Kota

.....

NIP

Tembusan Yth:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi.....(*dukungan LAP kompilasi*)
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Daftar Lampiran Laporan

1. Berita Acara Pembahasan Hasil Audit
2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik

(FORMAT LAPORAN D2 / E2)

LOGO/KOP APIP ITJEN K/L/ITJEN AD/AL/AU/IRWASUM POLRI

LAPORAN HASIL AUDIT TUJUAN TERTENTU
ATAS PELAKSANAAN DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN VAKSIN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA
FASYANKES VERTIKAL DI DALAM LINGKUP K/L/TNI AD/TNI AL/TNI AU/
POLRI
PER 31 AGUSTUS 2021 (*tanggal cut off*)

NOMOR :

TANGGAL : 2021

LOGO/KOP APIP ITJEN K/L/ITJEN AD/AL/AU/IRWASUM POLRI

Identitas dan Alamat APIP

Nomor : 2021

Lampiran :

Hal : Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) pada Fasyankes Vertikal di Dalam Lingkup K/L/TNI AD/TNI AL/TNI AU/ POLRI per 31 Agustus 2021
(tanggal cut off)

Yth. Menteri/Kepala Lembaga.....
di ...

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) pada Fasyankes Vertikal di Dalam Lingkup K/L/TNI AD/TNI AL/TNI AU/ POLRI per 31 Agustus 2021 (tanggal cut off), dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

a. Dasar Pelaksanaan Audit

Dasar pelaksanaan audit adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) , sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
- e. Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP- /D2/03/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;.
- f. *Dasar pelaksanaan audit lainnya yang berlaku di dalam lingkungan K/L/TNI AD/TNI AL/TNI AU/ POLRI per 31 Agustus 2021 (tanggal cut off) terkait)*

b. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas distribusi vaksin covid-19 dan pengelolaan persediaan vaksin *coronavirus disease 2019 (COVID-19)* dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan pengendalian yang ditemui.

c. Sasaran dan ruang lingkup audit

Sasaran audit meliputi Penilaian terhadap 4 tepat yaitu tepat sasaran/tujuan distribusi, tepat jumlah dan jenis, tepat waktu pengiriman, serta tepat administrasi atas distribusi vaksin covid-19 dan pengelolaan persediaan vaksin *coronavirus disease 2019 (COVID-19)* pada (jumlah) Fasyankes Vertikal di Dalam Lingkup K/L/TNI AD/TNI AL/TNI AU/ POLRI

Ruang lingkup audit terdiri dari pelaksanaan distribusi dan pengelolaan persediaan vaksin program covid-19 pada (jumlah) Fasyankes Vertikal di Dalam Lingkup K/L/TNI AD/TNI AL/TNI AU/ POLRI

d. Batasan Tanggung Jawab

Auditor hanya bertanggung jawab sebatas simpulan hasil audit. Kebenaran dan validitas dokumen yang disampaikan kepada auditor sebagai dasar

pengambilan simpulan menjadi tanggung jawab manajemen atau pihak-pihak terkait yang menyampaikan dokumen.

e. Metodologi Audit

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Dalam melaksanakan audit, diutamakan menggunakan metodologi yang sesuai dengan sifat penugasan yang dilakukan, antara lain dengan:

- a. Reviu dokumen;
- b. Pemeriksaan fisik/stok opname;
- c. Wawancara/konfirmasi;
- d. Observasi;
- e. Prosedur analitis;
- f. Prosedur audit lainnya yang relevan.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, dilakukan pendalaman/identifikasi permasalahan apabila kondisi tidak sesuai kriteria. Selanjutnya, terhadap kondisi tidak sesuai kriteria tersebut, tim audit melakukan identifikasi permasalahan, analisis permasalahan, identifikasi penyebab dan akibat, dan melakukan perumusan rekomendasi yang sesuai.

f. Waktu Pelaksanaan Audit

Sesuai dengan Surat Tugas pimpinan APIP Nomor ST- tanggal perihal, Pelaksanaan audit atas Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) pada Fasyankes Vertikal di Dalam Lingkup K/L/TNI AD/TNI AL/TNI AU/ POLRI per 31 Agustus 2021 (*tanggal cut off*) dilaksanakan selama Hari Penugasan mulai tanggal.... sampai dengan tanggal....

g. Informasi Umum

a. Identitas auditan

Pemeriksaan atas akuntabilitas distribusi vaksin covid-19 dan pengelolaan persediaan pada Fasyankes Vertikal di Dalam Lingkup K/L/TNI AD/TNI AL/TNI AU/ POLRI dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1:

No	Jenis Fasyankes	Nama Fasyankes	Alamat Fasyankes
1.	RS vertikal	a. RS Vertikal xxx	
		b. RS Vertikal xyz	
2.	EP Fasyankes Lainnya (<i>Memiliki Akun SMILE</i>)		

- b. Pencatatan stok vaksin yang dilakukan pengujian pada EP Fasyankes atas Vaksin program Covid-19 per 31 Agustus 2021 (tanggal cut off audit)

Saldo stok vaksin pada EP Fasyankes K/L/TNI AD/TNI AL/TNI AU/ POLRI atas Vaksin program Covid-19 per 31 Agustus 2021 (*tanggal cut off audit*) yang dilakukan audit adalah sebagai berikut:

No	Nama EP-Fasyankes	Sisa saldo per Jenis Vaksin per 31 Agustus 2021						
		Coronavac	Astrazanecca	Moderna	Pfizer	Sinopharm (ex hibah UEA)	Vaksin program Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	RS vertikal A							
2	RS Vertikal B							
3	dst							
	Total							

- h. Hasil audit.

Hasil Audit atas akuntabilitas distribusi vaksin covid-19 dan pengelolaan persediaan pada Fasyankes Vertikal di Dalam Lingkup K/L/TNI AD/TNI AL/TNI AU/ POLRI per 31 Agustus 2021 (*tanggal cut off audit*) dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hasil stok opname

Dari Hasil kompilasi Stok Opname atas vaksin program di gudang farmasi EP Fasyankes Vertikal di Dalam Lingkup K/L/TNI AD/TNI AL/TNI AU/ POLRI per 31 Agustus 2021 (*tanggal cut off audit*), dapat dilaporkan sebagai berikut:

No.	Nama EP-Fasyankes yang dilakukan audit	Sisa Stok menurut SMILE Per 31 Agustus 2021 (dosis)	Sisa Stok Audited Per 31 Agustus 2021 (dosis)	Selisih Per 31 Agustus 2021 (dosis)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)
1.	RS vertikal A			
2.	Fasyankes B			
3.	Fasyankes C			
4.	DST			
	Total			

Dari hasil stok opname, Terdapat selisih hasil stock opname dengan catatan hasil output SMILE terkait total sisa persediaan vaksin sebagai berikut:

*(uraikan penjelasan selisih dari **kompilasi** hasil perhitungan/ konfirmasi per fasyankes, agar perhitungan dan/atau berita acara pembahasan per fasyankes **dilampirkan**),*

**contoh penyajian*

jika terdapat selisih total saldo stok vaksin menurut SMILE lebih besar dibanding dengan total saldo audited sebesar 400 dosis, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Terdapat vaksin yang dibuang karena rusak/tidak layak yang tidak tercatat di SMILE di faskes A dan B (didukung dengan bukti fisik/Berita acara) (dosis)	50
b. Terdapat konsumsi vaksin yang tidak tercatat di SMILE pada faskes B dan C (didukung dengan bukti fisik/Berita acara) (dosis)	250
c. terdapat penerimaan vaksin yang belum diinput di faskes C di SMILE	-100
d. terdapat selisih vaksin yang tidak dapat dijelaskan di faskes A,B,C, dst (dosis)	200
Jumlah Selisih	400

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

1) ...

2) ...

Akibatnya.....

1) ...

2) ...

Sehubungan dengan permasalahan tersebut terutama atas selisih yang tidak dapat dijelaskan telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya oleh Pimpinan EP Fasyankes Vertikal di Dalam Lingkup K/L/TNI AD/TNI AL/TNI AU/ POLRI sebagai berikut (uraikan rencana tindak lanjut oleh mitra pengawasan):

1) ...

2) ...

e. Penilaian ketepatan Jumlah dan Jenis vaksin

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan Jumlah dan Jenis vaksin program yang dijumpai dalam pelaksanaan audit pada Fasyankes Vertikal di Dalam Lingkup K/L/TNI AD/TNI AL/TNI AU/ POLRI. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi”.

Temuan terkait ketidaktepatan Jumlah dan Jenis vaksin , antara lain:

1) *EP-Fasyankes tidak menerima jumlah dan jenis vaksin yang sesuai dengan alokasi;*

2) *Terdapat anomali konsumsi vaksin dibandingkan dengan jumlah orang yang telah dilakukan vaksinasi;*

3) *Terdapat selisih hasil stock opname dengan catatan hasil output SMILE terkait sisa persediaan vaksin di EP-Fasyankes yang tidak dapat dijelaskan.*

Selain TAO-TAO tersebut diatas, APIP dapat menambahkan temuan terkait ketidaktepatan Jumlah dan Jenis vaksin pada bagian ini.

Contoh Penyajian:

Berdasarkan audit pada pada Fasyankes Vertikal di Dalam Lingkup K/L/TNI AD/TNI AL/TNI AU/ POLRI terdapat kondisi EP-Fasyankes tidak menerima jumlah dan jenis vaksin yang sesuai dengan alokasi sebanyakfasyankes dengan rincian sebagai berikut:

No	Tempat Keterjadian	Jml vaksin kurang/tidak sesuai alokasi (dosis)
1.	Fasyankes A	... dosis
2.	Fasyankes B	... dosis
3.	Fasyankes C	... dosis
4.	dst...	... dosis
Jumlah		... dosis

**jika memungkinkan agar membuat lampiran atas kondisi temuan audit yang lebih rinci yang terjadi per fasyankes yang telah dilakukan uji petik*

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

- 1) ...*
- 2) ...*

Akibatnya.....

- 1) ...*
- 2) ...*

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya oleh Pimpinan EP Fasyankes Vertikal di Dalam Lingkup K/L/TNI AD/TNI AL/TNI AU/ POLRI sebagai berikut (uraikan rencana tindak lanjut oleh mitra pengawasan):

- 1) ...*
- 2) ...*

f. Penilaian ketepatan Administrasi

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan Administrasi vaksin program yang dijumpai dalam pelaksanaan audit pada (jumlah) Fasyankes. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi”.

Temuan terkait ketidaktepatan administrasi, antara lain

- 1) Pencatatan/administrasi persediaan vaksin (penerimaan, konsumsi, dan pengembalian distribusi) di EP-Fasyankes tidak terekam secara elektronik dengan tertib;
- 2) Jika tidak dapat melakukan pencatatan secara real time melalui aplikasi SMILE sebagaimana TAO huruf b, EP-Fasyankes juga tidak melakukan pencatatan/administrasi manual atas persediaan vaksin (penerimaan, konsumsi, dan pengembalian distribusi) dengan tertib;

Contoh Penyajian:

Berdasarkan audit pada (jumlah) Fasyankes Ditemukan pencatatan/administrasi persediaan vaksin (penerimaan, konsumsi, dan pengembalian distribusi) di EP-Fasyankes tidak terekam secara elektronik dengan tertib, yaitu Puskesmas A, Puskesmas B, Puskesmas C, dst...

**Jika dimungkinkan agar membuat lampiran atas kondisi temuan audit yang lebih rinci yang terjadi pada fasyankes yang telah dilakukan uji petik*

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

- 1) ...
- 2) ...

Akibatnya.....

- 1) ...
- 2) ...

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya oleh Pimpinan Fasyankes sebagai berikut (uraikan rencana tindak lanjut oleh mitra pengawasan):

- 1) ...
- 2) ...

g. Indikasi Fraud

Hasil Audit pada (jumlah) EP Fasyankes atas pengelolaan distribusi dan pengelolaan stok Vaksin program Covid-19 per 31 Agustus 2021 (tanggal cut off audit) ditemukan adanya indikasi fraud yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Menguraikan permasalahan terkait dengan adanya indikasi fraud atas distribusi vaksin program dan pengelolaan persediaan vaksin Covid-19 yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi”.

Temuan terkait indikasi fraud, antara lain:

- 1) Penyalahgunaan wastage rate vaksin Covid-19*
- 2) Adanya dugaan vaksin hilang, diperjualbelikan, dan/atau tidak dapat dijelaskan*

Contoh Penyajian:

Berdasarkan audit pada (jumlah) Fasyankes, terdapat dugaan vaksin yang diperjualbelikan, yaitu yang terjadi pada Puskesmas A, Puskesmas B, Puskesmas C, dst...

**Jika dimungkinkan agar membuat lampiran atas kondisi temuan audit yang lebih rinci yang terjadi pada Fasyankes yang telah dilakukan audit*

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

- 1) ...*
- 2) ...*

Akibatnya.....

- 1) ...*
- 2) ...*

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya oleh Pimpinan Fasyankes sebagai berikut (uraikan rencana tindak lanjut oleh mitra pengawasan):

- 1) ...*
- 2) ...*

h. Hal – hal yang perlu diperhatikan

Menguraikan permasalahan lain yang dijumpai dalam pelaksanaan audit di ... (jumlah) Fasyankes yang dilakukan audit, seperti yang berkaitan dengan lemahnya tata kelola persediaan vaksin di Fasyankes yang dilakukan audit.

Penyajian temuan yang meliputi “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi” dapat merujuk pada penyajian temuan diatas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu Menteri/Kepala Lembaga diucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal
AD/AL/AU/IRWASUM
POLRI

.....
NIP

Tembusan Yth:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK (D2 (*dukungan LAP kompilasi*))
2. (*dapat ditambahkan sesuai dengan tupoksi masing2 instansi*)

Daftar Lampiran Laporan:

Berita Acara Pembahasan Hasil Audit per fasyankes yang dilakukan audit

Lampiran Pedoman Pengawasan No 4

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK PERSEDIAAN VAKSIN COVID-19
STOCK OPNAME (PER TANGGAL 2021)**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dipada pukul WIB sampai dengan selesai, kami:

1. N a m a :
NIP :
Jabatan : (Tim Auditor)

berdasarkan Surat Tugas Nomor.....tanggal telah melakukan pemeriksaan fisik atas persediaan vaksin Covid-19 pada Gudang/Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota..... yang dikelola oleh:

2. N a m a :
NIP :
Jabatan :(Pengelola Gudang)
Nomor dan Tgl SK :

dengan hasil sebagai berikut:

No	Jenis Vaksin	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Coronavac (Singledose)	Vial		Dosis		Perhitungan 1 vial ke dosis sesuai dengan standar Kemenkes per jenis vaksin
2.	Coronavac (Multidose)	Vial		Dosis		
3.	Astrazeneca	Vial		Dosis		
4.	Sinopharm	Vial		Dosis		
5.	Moderna	Vial		Dosis		
6.	Dll	Vial		Dosis		
JUMLAH						

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan Vaksin Covid-19 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa
Jabatan

Nama.....
NIP.....

Tim Auditor
1. Nama...
NIP ...
2. Nama...
NIP ...
3. Nama...
NIP ...

Mengetahui
Jabatan

Nama.....
NIP.....

**BERITA ACARA PEMBAHASAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN
PERSEDIAAN VAKSIN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dipada pukul WIB, kami:

1. N a m a :
NIP :
Jabatan :

Sebagai “PIHAK KESATU ”

2. N a m a :
NIP :
Jabatan :

Sebagai “PIHAK KEDUA” telah mengadakan pembahasan bersama mengenai hasil pengawasan pelaksanaan distribusi dan pengelolaan persediaan vaksin Covid-19 pada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagaimana tertuang dalam Lampiran.

Tindak lanjut temuan tersebut di atas merupakan wewenang pimpinan obyek pemeriksaan.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Nama.....
NIP

Nama.....
NIP

**LAMPIRAN BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN
PERSEDIAAN VAKSIN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....**

1. Hasil Pengawasan

Dari Hasil Stok Opname atas vaksin program di gudang farmasi entitas pencatatan Provinsi/Kabupaten/Kota per tanggal (*cut off audit*), dihasilkan simpulan sebagai berikut:

No.	Jenis Vaksin	Sisa Stok menurut SMILE (dosis)	Sisa Stok Audited (dosis)	Selisih (dosis)	Penjelasan Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sinovac				
2.	Astrazeneca				
3.	Novavax				
4.	Pfizer				
5	Sinopharm (ex hibah UEA)				
6	Vaksin program Lainnya				
	Total				

Dari hasil stok opname, Terdapat selisih hasil *stock opname* dengan catatan hasil output SMILE terkait sisa persediaan vaksin di EP-Kako yang tidak dapat dijelaskan sebesar dosis.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut (uraikan rencana tindak lanjut oleh mitra pengawasan):

- a.
- b.

2. Temuan Hasil Pengawasan

Temuan hasil pengawasan selain terkait dengan persediaan dapat dijabarkan sesuai dengan TAO atau permasalahan lain yang ditemukan di lapangan beserta dengan Rencana Tindak Lanjut yang telah disepakati.

Demikian Berita Acara Hasil Pembahasan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Nama.....
NIP

Nama.....
NIP

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd
MUHAMMAD YUSUF ATEH

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi


ERI SATRIANA